



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIRJEN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : Ke-10
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.15 WIB s.d. 16.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Ridwan Bae (F-P. GOLKAR), Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Acara :
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai bulan Mei 2023
2. Membahas rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing Unit Eselon I
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
27 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
6 dari 12 orang Anggota
1. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
2. Ir. Sudjadi
3. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
4. Sri Rahayu
5. Harvey B. Malaihollo
6. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. Cen Sui Lan
4. DR. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.
5. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
5 dari 7 orang Anggota
 1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.
 2. Ir. Sumail Abdullah
 3. Sudewo, S.T., M.T.
 4. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 5. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
1 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
1 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
3 dari 4 orang Anggota
 1. H. Boyman Harun, S.H.
 2. Athari Ghauthi Ardi
 3. Mesakh Mirin, SKM.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang Anggota
 1. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI
(Ir. Diana Kusumastuti, M.T.),
2. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR RI
(Iwan Suprijanto, S.T., M.T.).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Cipta Kerja, kok Cipta Kerja, Cipta Karya ini, dia
habis buat undang-undang mungkin,
Yang terhormat Ibu Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan
Kementerian PUPR beserta seluruh jajarannya,
Yang terhormat para Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Dirjen
Cipta Karya, nanti sebentar barangkali Bu Dirjen yang akan perkenalkan
langsung kepada kita semua, terhadap kepala balai yang sempat hadir
dan yang terhormat juga para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan, Dirjen Perumahan di seluruh Indonesia, serta
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan dari sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 25 orang yang hadir fisik dan jumlah fraksi ada 9, dengan demikian telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkan saya membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), rapat dengar pendapat ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.15 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, tentu beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini yang turut menghadirkan para Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah seluruh Indonesia dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan seluruh Indonesia.

Sebagaimana undangan, tepuk tangan dulu barangkali untuk para Kepala Balai, jadi ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di atas karena ruangan kita tidak muat. Sebagaimana undangan yang telah disampaikan RDP pada hari ini, diagendakan membahas Evaluasi Prasarana APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit Eselon I.

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI dan para Dirjen, serta Yang kami hormati, serta hadirin yang kami hormati maksudnya ini,

Kurang-kurang ini ketikannya. Berdasarkan data yang kami peroleh, realisasi anggaran Dirjen Cipta Karya per 12 Juni 2023 adalah sebesar 24,60% dan Dirjen Perumahan sebesar 24,36%, *wah*, luar biasa ini sama-sama 24%. Dalam kesempatan RDP ini, kami meminta penjelasan dari Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan terkait langkah-langkah strategis yang diambil agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 telah disepakati beberapa hal di antaranya: pagu indikatif Tahun Anggaran 2024 Kementerian PUPR adalah sebesar 128 triliun koma apa 128,15 triliun. Dari alokasi pagu indikatif tersebut, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya adalah sebesar 27 triliun, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: pembangunan perluasan SPAM, pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan, penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan dukungan terhadap program padat karya.

Selanjutnya, Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar, *waduh* gimana ini, Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 6,191 triliun yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan antara lain: pembangunan rumah susun, pembangun rumah khusus dan bantuan perumahan swadaya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan kembali agar dalam proses penyusunan pagu anggaran Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam seluruh rangkaian rapat kerja dan rapat dengar pendapat sampai dengan hari ini.

Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dari Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur utamanya di kawasan pariwisata dan kawasan-kawasan pertumbuhan daerah;
2. Perlu peningkatan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat dan program padat karya tunai di daerah-daerah sebagaimana saran dan masukan Komisi V DPR RI;
3. Perlunya ketersediaan data yang akurat terkait jumlah rumah tidak layak huni agar program atau kegiatan penyediaan perumahan menjadi lebih tepat sasaran;
4. Diperlukan transportasi data terkait *backlog* perumahan yang dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk menyampaikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dan rencana lokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit Eselon I.

Kami persilakan duluan siapa ini, Ibu Dirjen atau Pak Dirjen dulu ini? Ibu Dirjen dulu karena tinggi anggaran 27 triliun. Disingkat-singkat saja, bu ya, silakan, Bu.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan sidang rapat.

**Yang kami hormati tentunya Pimpinan Komisi V DPR RI,
Yang kami hormati para Anggota Komisi V DPR RI, dan
Juga yang saya hormati Bapak Dirjen Perumahan beserta para Eselon II
serta Ka.Balai seluruh Indonesia yang juga hadir di sini, dan
Tentunya yang saya banggakan juga teman-teman Balai ya, Balai
Prasarana Permukiman Wilayah yang hari ini hadir semuanya, kecuali dua
Bapak yang tidak hadir, Jawa Timur dan juga Balai Struktur yang tidak
hadir karena naik haji Bapak,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Mohon izin Pimpinan dan juga para Anggota Komisi V DPR RI, kami dari Cipta Karya akan melaporkan dua hal yaitu adalah evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2023 sampai dengan bulan Mei ini dan juga kami nanti akan menyampaikan rencana alokasi anggaran Tahun 2024.

Bapak-Ibu sekalian,

Saat ini...

KETUA RAPAT:

Bu Dirjen, Bu Dirjen dan sekaligus Anggota yang terhormat, apa perlu kita minta Ibu Dirjen memperkenalkan kepala balainya karena jauh-jauh mereka datang, perlu? Silakan Bu Dirjen perkenalkan mereka.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik, baik, mohon izin.

Kami disini hadir bersama 9 unit Eselon II hadir semua, Bapak, direktur-direktur. Mungkin direktur dulu saya perkenalkan mulai dari ujung, Pak Tanozisocho Lase sering dipanggil dengan Pak Anes, Direktur Sanitasi, kemudian selanjutnya Pak Wahyu Direktur PKP, Pak, ini terkait dengan PISEW ya, Pak Anes terkait dengan LPK, TPS3R dan untuk Sanimas. Kemudian selanjutnya adalah Pak Anang ya beliau adalah Direktur Air Minum ya Pamsimas, kemudian selanjutnya adalah Pak Cakra ini baru Pak, dulu di Jawa Tengah saat ini beliau menjadi Direktur BPB ya, kemudian Pak Utoro, Pak Utoro ini adalah Direktur Kepatuhan Intern ya, kemudian Pak Riyono ini adalah Direktur, eh SesDirjen Cipta Karya Bapak, SesDirjen Cipta Karya. Kemudian ya, Bu Essy tolong maju ke sini nanti, ya ini Bu Essy, Direktur Prasarana Strategis, yang *ngurusin* masalah sekolah madrasah ya, Bu Essy tolong maju ke depan ya, kemudian Bu Ira itu Direktur Teknik, Bina Teknik untuk Prasarana Perumahan dan Permukiman ya, Bu Ira ya, terima kasih.

Kemudian di samping saya adalah Pak Pandu, beliau adalah Direktur SSPIP, Pak, masalah program dan penganggarannya dan di sini ada teman-teman balai, ini ada 34 balai, BPW, mungkin kami akan coba satu-satu yang hadir di sini. Aceh itu Pak Deni silakan berdiri, ini Pak Deni, Aceh, Bapak, kemudian Sumut itu Pak Safril, Pak Safril ada di belakang, Pak, Pak Safril ya. Kemudian untuk Balai Sumatera Barat itu Pak Kusworo, Pak Kusworo hadir ya, kemudian balai Kepulauan Riau ya Kepulauan Riau itu Pak Fasri, ya Pak Fasri Bahmid ya, kemudian Balai Riau adalah Pak Halil, Halil Kastela ya. Kemudian Jambi, Jambi Pak Dibyo, ya ini Pak Dibyo Jambi, kemudian Sumatera Selatan itu Pak Irwan ya, Kusuma Pak Kusuma ya, kemudian Babel/Bangka Belitung itu Ibu Miarka ya, Ibu Miarka, kemudian Pak Dendi itu Balai Bengkulu, Balai Bengkulu.

kemudian di Lampung itu Ibu Maria Duni, ya Bu Duni, sering disebutnya Bu Duni. Kemudian DKI Jakarta itu Pak Albert ada di belakang ya, Pak Albert untuk DKI Jakarta, kemudian Banten itu Pak Yosa Habibie ya, Pak Yosa Habibie ya. Kemudian Jawa Barat itu Pak Oskar, ya Jawa Barat Pak Oskar, kemudian Jawa Tengah sekarang adalah Pak Koswara ada di belakang, Pak Koswara, kemudian Yogyakarta, Pak Joni ya, Pak Joni, Zainuri Ihsan, kemudian Jawa Timur itu sedang naik haji tapi ada Plt-nya, Pak Feriko, mudah-mudah Pak Feriko hadir juga di sini, Pak Feriko, ya ada di belakang ya, Plt nya Pak Feriko tapi Pak Reva sedang haji. Kemudian Kalimantan Barat itu Pak Deva, Pak Deva ada di Belakang, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu Pak Yanuar Seto ya, Pak Yanuar Seto, Kalimantan Tengah, kemudian kalimat Selatan Pak Davis ya, Pak Davis ya, kemudian Kalimantan Timur ada di belakang itu Pak Indra, Rozali Indra, kemudian Kalimantan Utara Pak Nuris ya, Pak Nuris Kalimantan Utara. Kemudian Bali, Bali itu Pak Andreas ya, Pak Andreas ya di Bali, kemudian di NTB Ibu Ika, kemudian di NTT, NTT itu Pak Norman ya, Pak Norman ya NTT. Kemudian di Sulawesi, Sulawesi Utara Pak

Aji, Pak Aji Kriswandono Sulawesi Utara, Kemudian Sulawesi Tengah, Pak Sahabudin, ya Pak Sahabudin, kemudian Sulawesi Tenggara, Pak Wayan ya, Pak Wayan, Kemudian Sulawesi Barat Pak Baskoro, Pak Baskoro, kemudian Sulawesi Selatan Pak Asiri, Pak Asiri silakan Pak Asiri. Kemudian Gorontalo Bu Nurdiana ya, Bu Nurdiana, kemudian Ambon itu Pak Reza ya, Pak Reza Maluku, Pak Reza Kepala Balai Maluku Pak Reza, Maluku Utara Pak Firman Aksara, mitranya Bu ya, Pak Firman Aksara, kemudian Papua, Papua ini adalah Pak Sagrim ya, Pak Sagrim hadir.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Mana, oh ya. kenal saya *nggak tuh* Pak Sagrim?

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Udah kenalan Pak Sagrim?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, Pak Sagrim kalau *nggak* kenal saya marahi Ibu.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Kemudian Papua Barat, Pak Marsudi ya, Pak Marsudi Papua Barat, Pak Harvey kemarin, tadi nyariin.

Kemudian selain Balai PPW, kami ini ada juga Balai Teknik Air Minum, Bapak, Balai Teknik Air Minum yang ada di Bekasi itu Bu Fitri, Bu Fitri silakan berdiri. Kemudian ada Balai Teknik Sanitasi, Bapak, itu Pak Didon saya panggilannya, Pak Dwikoryanto, panggilan sayangnya Pak Didon. Kemudian ada Balai Bahan dan Struktur ini sedang naik haji, kemudian Pak Budianto Prasetyo, beliau adalah Balai untuk Kawasan Permukiman dan Perumahan ya, kemudian yang terakhir adalah Pak Ajun, Pak Ajun ini adalah Balai Teknik Sains Bangunan.

Jadi itu Bapak, balai-balai yang ada di Cipta Karya, ada 39 balai, 34 nya Balai PBW dan 5 nya adalah Balai Teknik, Bapak.

Izin Bapak, kami melanjutkan. Jadi saat ini kalau kami sampaikan bahwa Cipta Karya ini diamanahkan untuk mengelola pagu anggaran sebesar 28,02 triliun, Bapak, dan alokasi ini meningkat 11,95% atau 2,99 triliun dari dipa awal tahun 2023 yaitu sebesar 25,03 triliun ya. *Nah*, saat ini realisasi keuangan progres keuangan Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2023 per tanggal 12 Juni 2023 ini baru mencapai 24,6 triliun *eh* 26%, mohon maaf, 24,6% dari total pagu 28,02 triliun tadi. *Nah*, sedangkan realisasi fisiknya itu baru 23,09%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi keuangan Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2022, ini masih terdapat deviasi positif sebesar

5,5%. Jadi lebih tinggi saat ini, Pak, dibandingkan tahun 2022 kemarin, posisi kalau 2022 itu kemarin sebesar 19,10% dengan total 14,10 triliun.

Selanjutnya terkait dengan status tender, Bapak, izin tahun 2023 ini dari 625 paket kontrak di Direktorat Jenderal Cipta Karya, sebanyak 587 paket ini sudah merupakan paket reguler dengan total 4 triliun dan 38 paket ini merupakan paket kegiatan IKN yang totalnya adalah 5,33 triliun. Jadi sebanyak 93% dari total paket reguler, 546 paket ini sudah tayang lelang ya, di mana kalau kita lihat 291 paket sudah dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan 41 paket ini belum lelang dan saat ini dalam tahap finalisasi dokumen teknis dan juga rencananya akan kami lelangkan paling lambat ini minggu ke-4 Juni tahun 2023 ini. Ini termasuk juga pasar Painan, kemudian Stadion Kanjuruhan, kemudian juga ada IPA di Parapat, kemudian juga ada beberapa kegiatan KSPN untuk mendukung KSPN tadi dan rehab untuk rumah sakit Undata untuk yang fase 2B, sedangkan 38 paket pembangunan IKN, ini 15 paket sudah tayang lelang dan juga 9 paket ini sudah mulai beralih ke tahap konstruksi.

Nah, konstruksi ini antara lain adalah *line development* di 1B, kemudian *line development* 1C dan juga pembangunan jaringan pipa transmisi air minum untuk SPAM Sepaku paket 1, dan masih ada sisa sebanyak 23 paket kegiatan IKN yang belum lelang dan mudah-mudahan ini juga bisa kami lelangkan pada minggu kedua atau ketiga di bulan Juni ini ya. Misalnya seperti untuk prasarana pemerintahan dua ibukota negara kemudian ada bangunan gedung untuk masjid negara, kemudian untuk jaringan air limbah, kemudian juga untuk kantor PUPR ya.

Kemudian pelaksanaan kegiatan IBM padat karya pada Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2023 ini telah mencapai 42,47% dari total pagu 2,1 triliun dan progres fisiknya ini sudah sebesar 13,38% ya dan program padat karya Direktorat Jenderal Cipta Karya ini berdasarkan pemantauan sampai dengan saat ini terdata, ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 15.639 orang dari rencana total penyerapan tenaga kerja 62.000 orang. Alokasi pagu ini dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan Pamsimas ini di 1.063 lokasi dan ini sudah menyerap tenaga kerja 1.698 orang. Kemudian Sanimas 1,890 lokasi dan ini telah menyerap tenaga kerja 5.157 orang, kemudian sanitasi di lembaga pendidikan keagamaan pada 1.550 lokasi, ini juga telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2.533 orang dan juga TPS3R pada 307 lokasi dan ini juga sudah menyerap tenaga kerja sebesar 528 orang dan PISEW di 1.340 lokasi, ini juga sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 5.106 orang. Dan ini kami masih ada beberapa lokasi sarana untuk kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya ini yang rencananya akan kami tetapkan melalui SK tahap ketiga atau yang terakhir, ini masih ada untuk Pamsimas kemudian Sanimas, sanitasi, lembaga pendidikan keagamaan dan juga TPS3R.

Nah, berkenaan dengan tersebut, kami juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan dari kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat ini kami mohon Ibu-Bapak dari Anggota Dewan yang belum menyampaikan usulannya ini mohon juga segera disampaikan ke kami paling lambat itu tanggal 16 juni, Bapak. Mudah-mudahan, 16 Juni berarti hari Jumat, nanti kami akan segera

melakukan verifikasi dan juga penetapan bagi yang memenuhi kriteria di tahun Juni, apa, bulan Juni 2023 ini, kami mohon untuk segera disampaikan pada kami.

Dan mohon izin, ini kami juga ada beberapa kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang sedang *on going project*, ini sektor air minum ini ada optimalisasi SPAM Jagoi Babang, kemudian juga ada SPAM IKK Binjai Hulu di Kabupaten Sintang, kemudian juga pembangunan SPAM Berbah ya untuk mendukung KSPN Kabupaten Sleman. Untuk sektor sanitasi, ini juga ada kegiatan lanjutan untuk *waste water treatment plant* di Makassar kemudian pembangunan perpipaan air limbah di zona utara Pekanbaru, kemudian juga untuk optimalisasi TPS3R di Kota Palu dan juga ini gambarnya di Palu, Bapak, ini gambar di Palu dan ada juga di Sigi.

Kemudian untuk penataan bangunan dan gedung, ini ada beberapa pembangunan yang sedang *on going* itu adalah pembangunan gedung dan kantor ESDM (*suara kurang jelas*) di Jateng, kemudian Masjid Baitul Arham ini di Sumenep, kemudian juga untuk pembangunan gedung kantin, parkir di DPR RI. Kemudian juga untuk pengembangan kawasan permukiman ini ada beberapa lokasi yang sedang berjalan ini untuk kawasan Lagasa, Muna kemudian kawasan pesisir Labuang Majene, Talumolo Gorontalo, kemudian optimalisasi Kampung Harapan Papua, kemudian juga *Waterfront* di Kapuas Hulu Kalimantan Barat, kawasan Krueng Aceh, kemudian kawasan Kaimana Papua Barat dan juga rumah adat Atakkae di Wajo Sulawesi Selatan.

Kemudian untuk prasarana strategis ini juga ada beberapa yang sedang *on going*, untuk *indoor multi function stadium* di GBK kemudian juga rehabilitasi rekonstruksi untuk Universitas Tadulako fase 2, kemudian rehabilitasi dan Sebatik di Kalimantan Utara dan juga rehabilitasi Pasar Baru Tanjung Pinang ya, ini yang sedang kita lakukan. Dan selanjutnya, terdapat juga beberapa kegiatan pembangunan IKN yang telah berjalan, ini di antaranya adalah penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1 dan tahap 2, kemudian juga untuk penataan sumbu kebangsaan tahap 1, *land development* untuk 1b dan 1c, kemudian bangunan gedung kantor presiden pada kawasan istana presiden, demikian juga untuk bangunan istana negara, lapangan upacara yang nanti akan kita gunakan untuk upacara pada tanggal 17 Agustus 2024 ya. Kemudian IPAL, IPAL 1, 2 dan 3 di kawasan KIPP juga untuk bangunan gedung dan kawasan blok kantor Kemensekneg dan juga jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM Sepaku dan kemarin juga baru tanda tangan kontrak untuk TPST ya, TPST dan juga jaringan air minum.

Dan selain itu, tahun ini juga akan dimulai tempat pembangunan untuk TPST dan juga sekretariat presiden dan juga gedung kawasan di Kemenko 1, 2, 3 dan 4 dan nanti beberapa kantor ini akan kita gunakan sebagai *sharing office*, Bapak, di IKN, karena kita belum bisa membangun secara keseluruhan di Ibu Kota Nusantara ini. Dan selain paket *on going* ini juga ada beberapa kegiatan MYC bidang infrastruktur dan pekerjaan fisiknya juga sudah selesai, ini boleh kami laporkan di semester pertama ini, Besakih ya, penataan kawasan

Pura Besakih ini kemarin juga udah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2023 kemarin.

Kemudian juga untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh, perkotaan, Sungai Durian Sintang ini juga udah diresmikan Ketua DPR RI tanggal 19 Maret 2023. Ini ada rehabilitasi bangunan Pasar Gede Klaten tahap 2 ini juga Sudah 100% tapi belum diresmikan, siap untuk diresmikan. Pembangunan Pasar Induk Kota Batu ini juga sudah selesai 100%, ini juga siap juga untuk diresmikan, TPSP Kota Denpasar ini juga ada tiga yang kita bangun, Kertalangu, Padang Sambian dan juga di satu lagi Tahura ya, Tahura, ini juga sudah selesai 100% semuanya.

Kemudian ada TPA sampah di regional Kota Manado ini juga sudah selesai, ini siap juga untuk diresmikan.

Selanjutnya, kami juga sampaikan beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat yang telah dimulai tahun 2023 antara lain adalah kegiatan Pamsimas, ya. Ini Pamsimas ada di beberapa desa di Trenggalek Jawa Timur, Sanimas di kampung Dawe Kepulauan Yapen, kemudian Sanitasi di LPK Hidayah Tholibin ya, untuk muara sungai Kabupaten Lampung Utara, TPS3L di Kabupaten Purworejo dan kegiatan PISEW di Kecamatan Pamana Kabupaten Wajo ya.

Selain itu juga, kami juga bersama Pimpinan kemarin juga ada Anggota Komisi V, bulan Maret kemarin ini juga kami melakukan kunjungan kerja ya, di beberapa lokasi infrastruktur Cipta Karya, salah satunya adalah ini pada saat kunjungan kerja di Kabupaten Cianjur pasca bencana kemarin ya. Kemudian juga ada di *waterfront* Siluk di tepian Sungai Kapuas yang di Putussibau, ini yang terkait dengan 2023.

Kemudian tahun 2024, mohon izin, kami akan menyampaikan rencana alokasi anggaran yang berdasarkan fungsi, program dan prioritas anggaran di 2024 ini. Tema dari rencana kerja pemerintah tahun 2024 ini adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan ini ada 7 prioritas nasional, 7 prioritas nasional ini yang pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kemudian, *nah* ini yang kedua itu adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan juga menjamin pemerataan. Yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dan juga untuk yang kelima memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan juga perubahan iklim. Dan yang ketujuh adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan *public*. Dalam hal ini Cipta Karya ini akan mendukung di semua prioritas nasional tersebut.

Kemudian untuk rencana anggaran tahun 2024, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga telah menyampaikan kebutuhan ya, kebutuhan kami itu

adalah sebesar 32,46 triliun. Namun, sesuai dengan edaran bersama pagu indikatif yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan juga Menteri Bappenas serta juga telah ditindaklanjuti oleh surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui, Nomor KU 01011138 tahun, tanggal 24 Mei 2023 ini, hal: Penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024, pagu indikatifnya Cipta Karya tahun 2024 itu ditetapkan 27 triliun dan selanjutnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR pada kesempatan Raker yang lalu, prioritas penganggaran 2024 Direktorat Jenderal Cipta Karya ini diprioritaskan, yang pertama adalah untuk menyelesaikan kegiatan kontrak jamak MYC ya tahun yang telah dilakukan juga untuk kegiatan *committed* lainnya, seperti kegiatan pendanaan hibah luar apa pinjaman dan hibah luar negeri, kemudian SBSN serta untuk kegiatan fungsi pendidikan. Dan yang kedua adalah optimalisasi infrastruktur yang telah terbangun, ini agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri adalah OPOR ya, Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan juga Rehabilitasi. Dan yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah penugasan dari Bapak Presiden.

Nah, sejalan dengan prioritas penganggaran yang tadi kami sampaikan, ini ada pohon anggaran dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, pemanfaatan dari 27 triliun tersebut ya. Program dukungan manajemen itu sebesar 0,9 triliun ini digunakan untuk pemenuhan wajib antara lain berupa gaji, tunjangan dan operasional perkantoran. Kemudian program perumahan dan permukiman ini sebesar 26, 26 triliun ini terdiri dari rupiah murni 23 triliun dan juga untuk pinjaman hibah luar negeri sebesar 2,92 triliun.

Kemudian anggaran rupiah murni program perumahan permukiman pada Direktorat Jenderal Cipta Karya ini sebesar 23 triliun dan rincinya ini terbagi untuk membiayai kegiatan fungsi pendidikan ini sebesar 2,99 triliun, termasuk juga kegiatan yang MYC, kemudian kegiatan optimalisasi fungsi atau OPOR, ini optimalisasi fungsi OPOR ini untuk air minum dan juga TPA, ini sebesar 0,28 triliun. Kemudian ada cadangan darurat ini untuk optimalisasi *eh* untuk mobilisasi peralatan tanggap darurat dan juga cadangan penanganan mendesak termasuk juga bencana, ini sebesar 0,17 triliun. Kemudian kegiatan SBSN, kami ada untuk air minum Jatiluhur, SPAM Jatiluhur.

Kemudian kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat, kami teralokasi 2,1 triliun, angkanya sama dengan tahun 2023 termasuk untuk penanganan kemiskinan ekstrim, ini ada alokasi BLM sebesar 1,8 triliun dan *save guarding* nya 0,28 triliun. Kemudian untuk pemenuhan MYC ini sebesar 6,6 triliun, ini ada MYC lanjutan sebesar 5,1 triliun, MYC baru ini untuk kegiatan penugasan atau direktif 1,5 triliun dan juga untuk pembayaran hutang ya, pembayaran hutang eskalasi 0,03 triliun. Dan selain itu, juga ada kegiatan dukungan teknis lainnya ini sebesar 0,79 triliun dan dukungan untuk pembangunan Ibu kota negara sebesar 9,61 triliun.

Dan Bapak-Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan bahwa total pagu Direktorat Jenderal Cipta Karya ini belum memperhitungkan kebutuhan dari

DOB-nya Papua dan Papua Barat, ini ada tambahan yang kemudian kebutuhan ini nanti akan disampaikan kepada Kemendagri kepada kementerian Keuangan. Jadi usulannya bukan melalui PUPR tapi melalui Kementerian Dalam Negeri dan ini masukan nanti kami akan sampaikan melalui surat Bapak Menteri kepada Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, kami sampaikan juga rencana kegiatan per unit Eselon II sebagai berikut: air minum itu anggarannya sebesar 4,07 triliun, ini terkait dengan kegiatan prioritas antara lain adalah untuk pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.835 liter per detik, ini antara lain untuk SPAM IKK Galing Sambas, pembangunan SPAM Regional Mamminasata, pembangunan SPAM IKK Sibisa di Toba, kemudian pembangunan SPAM Afulu di Nias Utara, pembangunan SPAM Pangkalan Kerinci Pelelawan ya, pembangunan SPAM Sedanau Natuna, pembangunan SPAM Bintang Bano, kemudian pembangunan SPAM IKK di Gunung Sitoli, SPAM IKK Tampung Hulu di Kampar, kemudian SPAM Regional Wosokus Jawa Tengah, kemudian regional, SPAM Regional Benteng Kobema di Bengkulu dan juga SPAM IKK Katulampa di Bogor dan juga prasarana air minum di Ibu kota Nusantara ya, ini berupa jaringan distribusi umum dan juga SPAM IPA -ya dan jaringan interkoneksinya.

Kemudian untuk perluasan SPAM ini sebanyak 20.638 SR ini untuk pembangunan reservoir, jaringan perpipaan, distribusi utama dan juga sistem hilir untuk SPAM Regional Jatiluhur 1 di Kabupaten Karawang dan Bekasi dan juga SPAM jaringan distribusi utama untuk SPAM regional Baruna ya di Bali, kemudian SPAM berbasis masyarakat ini di 1.183 desa. Untuk sektor sanitasi anggaran sebesar 4,9 triliun ini untuk kegiatan prioritas adalah sistem pengolahan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK ini untuk di Jakarta *sewerage development project* zona 1 dan 6, kemudian pembangunan IPLT Samosir dan juga optimalisasi dari SPALD BT untuk di Aceh, kemudian juga prasarana sanitasi untuk di IKN.

Kemudian untuk pengelolaan persampahan dengan layanan 222.000 KK untuk pembangunan TPA Samosir, TPST Gianyar di, kemudian di Bandung, Cimahi, Bekasi, Indramayu, Depok, Cianjur, Cilegon, Padang kemudian juga Nias Utara ya, kemudian persampahan IKN ya ini di Ibu kota Nusantara.

Kemudian SPAM sanitasi yang berbasis masyarakat itu dengan layanan berupa pembangunan Sanimas itu 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.273 lembaga pendidikan keagamaan ya. Kemudian untuk pengembangan kawasan permukiman dengan anggaran sebesar 2,24 triliun, ini penataan kawasan prioritasnya adalah penataan kawasan strategis pariwisata nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seluas 342 hektar. Ini antara lain adalah KSPN Bromo Tengger Semeru tahap 2 dan 3, kemudian penataan kawasan *waterfront* Marina dan Keraton Lia, KSPN Wakatobi, kemudian penataan kawasan Malalayang dan Bunaken, penataan kawasan Dieng di Wonosobo, penataan kawasan dan pembangunan mendukung rumah khusus bagi warga eks Timor Timur dan juga penyiapan kawasan di Ibu kota Nusantara.

Kemudian pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat ini melalui PISEW, PISEW ini ada di 738 Kecamatan. Kemudian untuk penataan bangunan gedung ini anggarannya 7,49 triliun, prioritasnya adalah untuk pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung di 27.720 meter persegi. Ini adalah pembangunan untuk pusat anak muda Aceh unggul dan hebat amanah, kemudian Mako Paspampres, gedung Koni, rehab dan perkantoran Kabupaten Sigi, rekonstruksi Masjid Syuhada di Sulawesi Barat dan juga Kantor DPRD Sulawesi Barat ya serta untuk pembangunan pemantauan SPKKL di Natuna.

Kemudian untuk penyelenggaraan bangunan gedung dan *eh* bangunan dan lingkungan di tiga kawasan ini di Balekambang Surakarta juga penataan Benteng Pendem di Ambarawa dan juga penataan area publik Borasi yang ada di Manokwari. Kemudian pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN ini ada 13 paket termasuk untuk gedung sekretariat presiden, sarana prasarana pemerintahan, masjid negara ya dan juga 4 kementerian koordinator.

Kemudian untuk pendidikan, sarana pendidikan dengan anggaran Rp2,99 triliun ini prioritasnya adalah untuk rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah madrasah yang kondisinya rusak berat, ini di 328 unit, ini tersebar di seluruh Indonesia, ini termasuk Sekolah Negeri 10 Kedawangan Kabupaten Ketapang yang ditangani dengan penanganan MYC 2023-2024. Kemudian pembangunan rehabilitasi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri itu ada gedung Universitas Okmin, gelanggang inovasi kreativitas UGM, kemudian laboratorium keagamaan UIN Antasari di Banjarmasin, Haluoleo, kemudian juga Malikussaleh di Aceh kemudian Syah Kuala di Aceh juga, UIN Andalas, kemudian lapangan, laboratorium geologi UGM dan juga Tadulako.

Untuk pasar ini sebesar 3,13 triliun, ini untuk rehab renovasi pasar di 28 pasar termasuk pasar Godean, Banjarsari, Pekalongan, Pasar Jungke kemudian Pasar Baros di Serang, kemudian juga Pasar Kolpajung Pamekasan, Pasar Raya Padang, kemudian sanggeng di Manokwari. Untuk sarana olahraga ini juga ada pembangunan renovasi prasarana untuk PON Aceh Sumut, di Aceh itu ada 13 *venue*, kemudian di Sumatera Utara Ada Stadion, kemudian Stadion Kanjuruhan di Malang, asrama atlet di Pengalengan dan GOR Keerom serta prasarana untuk Universitas Negeri Semarang. Dan Rp1,7 triliun itu untuk kegiatan *turbine wash* untuk advis teknis keandalan bangunan dan kawasan permukiman dan juga untuk pusat studi kegempaan (Pusgem) yang ini melibatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga seperti BMKG, BRIN, BNPB, BIG, Perhubungan juga ESDM. Kemudian juga ada kajian-kajian terkait dengan kegempaan.

Kemudian dukungan manajemen ini 0,9 triliun ini ada gaji, tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran serta untuk pengelolaan SDM, serta untuk penyusunan laporan kinerja implementasi manajemen resiko dan komunikasi publik. Dan rencana pelaksanaan kegiatan dengan pola padat karya ini dialokasikan 2,1 triliun termasuk *safe guarding* dengan perkiraan

serapan tenaga kerja 47.000 orang, PISEW di 738 lokasi, serapannya 11.000 tenaga kerja kemudian Sanimas di 1.546 lokasi dengan serapan 15.455 tenaga kerja, Sanitasi lembaga pendidikan keagamaan di 1.279 lokasi, kami harapkan nanti bisa menyerap 7.648 ribu tenaga kerja. Kemudian juga TPS3R di 173 lokasi untuk menyerap 1.722 tenaga kerja, Pamsimas di 1.183 lokasi dengan serapan 11.829 ribu tenaga kerja, dan nanti juga akan ada dukungan kemiskinan ekstrem hanya ada di 15 provinsi.

Kemudian rencana pelaksanaan IBM ini juga secara garis besar kita rencanakan dengan *timeline*-nya, mungkin ini kami mohon menjadi perhatian semuanya, penjaringan dan verifikasi akan kita lakukan di tahun 2023 ini dan untuk persiapan SK lokasi dan juga penyusunan Juknis, kami akan selesaikan sampai dengan Desember 2023, rekrutmen mobilisasi TFL mungkin nanti di awal tahun 2024 di Februari, kemudian sosialisasi DED, RAB ini juga kami akan lakukan sampai dengan Juni 2024 dan penyusunan PKS nanti kami dan pencairan nanti sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 sehingga kami harapkan nanti kita bisa serah terima pemanfaatan sampai dengan akhir bulan Oktober 2024.

Nah, ini untuk khusus tahapan penjaringan dan verifikasi usulan untuk infrastruktur berbasis masyarakat 2024 ini, kami bisa mulai sampaikan di bulan Juli ya, September 2023 ini dan kami harapkan Agustus, Juli, September ini, kami secara keseluruhan bisa kami sampaikan rinciannya itu di Oktober 2023 ya. Ini kira-kira proses verifikasinya bisa selesai sehingga ini nanti akan kita jadikan sebagai dasar untuk penyusunan DIPA di 2024 sehingga kami nanti tidak tertunda pelaksanaannya di tahun 2024.

Demikian Pimpinan yang bisa kami sampaikan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kurang lebih kami mohon arahan selanjutnya dari Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi V.

Terima kasih, dan

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Eh, tepuk tangan dulu buat Bu Dirjen ini.

Silakan Pak Dirjen Perumahan, Pak Iwan.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Baik.

Terima kasih, Pak.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Selamat sore,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati dan kami banggakan jajaran Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,

Yang kami hormati pula Ibu Dirjen Cipta Karya,

Yang saya banggakan para Pejabat Tinggi Pratama baik dari Direktorat Jenderal Cipta Karya maupun Perumahan, dan

Para Kepala Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Perumahan,

Sebelum memulai paparan, izinkan saya juga memperkenalkan jajaran dari Direktorat Jenderal Perumahan, saya hadir ini lengkap, Pak, dengan jajaran Pimpinan tinggi pratama. Jadi mulai dari, nanti mohon berdiri ya, Pak SesDirjen, Pak Muhammad Hidayat, kemudian Pak Direktur Sistem Strategi Pak Edward yang mengurus program, kemudian berikutnya adalah Direktur Rumah Swadaya yang merupakan favorit Bapak-Ibu sekalian, Pak Muhammad, Pak K.M. Arsyad. Berikutnya ini direktur favorit lainnya ya, mungkin favorit Ibu-Ibu ya Direktur Rumah Susun, jadi Pak Aswin Sukahar, kemudian Direktur Rumah Khusus, Ibu Yusniawati dan Direktur Rumah Umum Komersial, Bapak Fitrah Nur, satu lagi adalah Direktur Kepatuhan Intern kami, Pak, Pak Bisma Staniarto.

Kami juga hadir lengkap, Pak, dengan seluruh 19 Kepala Balai termasuk ada dua Kepala Balai yang baru, Pak. Jadi yang pertama Kepala Balai Sumatera I ini untuk wilayah Aceh, Pak Tengku Faisal, kami persilakan berdiri, ini mitranya Pak Ruslan. Selanjutnya Kepala Balai Sumatera II, Pak Iswanto, ini lebih akrab dengan Bu Cen sebenarnya karena dulu di Cipta Karya. Balai Sumatera III yang membawahi Sumatera Barat, Riau dan Kepri, Pak Zubaidi kami persilakan, oke di belakang ya. Kemudian Sumatera IV, Pak Tambat Yulis untuk Jambi dan Bengkulu, Sumatera V, Pak Joni Rahman, jadi Sumatera Selatan, Babel dan Lampung, Pak Tamanuri.

Kemudian bergeser ke Jawa, Jawa I, Pak Firsta, ini untuk Banten dan DKI Jakarta. Kemudian Jawa II Jawa Barat, Pak Ki Agus Egi Ismail, Jawa III Pak Salahuddin, ini Jawa Tengah dan DIY, kemudian Jawa IV, Pak Sultan Sidik Nasution, ini untuk Jawa Timur dan Bali. Kemudian bergeser ke Nusa Tenggara, Nusa Tenggara I ini yang baru, Pak, ini Pak Wayan Swardhana NTB, kemudian untuk Nusa Tenggara II Ibu Yublina ini NTT, kemudian Kalimantan I, Pak Andi Suganda ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan II, ini Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, Pak Hujurat. Kemudian di wilayah Sulawesi, Sulawesi I ini untuk Gorontalo dan Sulawesi Utara, Pak Recky kami persilakan, Pak Recky, oh di belakang,

Kemudian untuk Sulawesi II ini Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Pak Bachtiar di atas, kemudian untuk Sulawesi III, ini Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Pak Iskandar Ismail, kemudian *nah* ini juga ada yang baru untuk Maluku dan Maluku Utara Pak Peter Pakabu, *nah*, ini mitranya Pak Ridwan Bae sebelumnya gitu ya yang promosi jadi Kepala Balai di Maluku dan Maluku Utara.

KETUA RAPAT:

Makasih, Pak, Makasih.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Kemudian untuk Papua, Papua I ada Pak Faisal Sudarno.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Oh ya, saya kira sudah ganti, Pak.

Terima kasih.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Dan ada yang baru satu lagi, *nah*, ini Jadi Mitra Pak Harvey, Papua Barat Pak Ridwan Dibya. Mohon maaf, Pak, di atas, sama-sama hobi nyanyi tapi beda tempat, Pak. Kalau Bapak di panggung tapi kalau Pak Ridwan saya *nggak* tahu, Pak.

Baik.

Itu mungkin, Pak, yang bisa saya perkenalkan. Selanjutnya, saya mohon izin untuk menyampaikan paparan.

Ada tiga hal yang akan kami sampaikan secara garis besar, yang paling utama adalah terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2023. Kemudian yang kedua, mungkin sedikit saya akan mengangkat terkait dengan tindak lanjut kaitannya dengan temuan BPK, ringkas saja sebagai turunan dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Dan yang ketiga adalah rencana kerja kami di tahun 2024 berbasis pagu indikatif.

Yang pertama terkait dengan evaluasi pelaksanaan, perlu kami sampaikan bahwa, *next slide*, DIPA awal dari Direktorat Jenderal Perumahan adalah sebesar 6,97 triliun yang saat ini mengalami penambahan sebesar 11 koma, menjadi 11,28 triliun di mana penambahan adalah, jadi ini kami laporkan sekaligus penambahannya kepada Bapak-Ibu sekalian, pertama adalah *top up* dari *loan* NAHP, jadi ini pengakhiran saja untuk penanganan kemiskinan ekstrim sebesar 100,6 M, kemudian *top up* dari *loan* CS RRP ini kaitan dengan

lanjutan sekaligus penuntasan dari pembangunan hunian tetap di Sulawesi Tenggara, ini sebesar 412,8 miliar, yang *InsyAllah* kita akan selesaikan di tahun ini. Kemudian ada tambahan ini dari BA BUN sebesar tiga koma tujuh koma empat sembilan triliun di mana 3,7 triliun di antaranya adalah untuk penugasan pembangunan Rusun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 47 tower yang akan dimulai pada tahun ini dan kemudian ada 42,3 miliar untuk pembayaran tunggakan penanganan bencana *cyclon* Seroja di NTT dan di Palu sebelumnya, serta 6,75 miliar untuk dukungan penyelenggaraan *Asean Summit* di 2023, serta ada sedikit pengurangan sebesar 1,37 miliar, jadi ini pengalokasian honor Pokja pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Yang kedua, kami ingin sampaikan adalah dari total anggaran Dirjen Anggaran, Dirjen Perumahan tahun 2023 sebesar 11,27 triliun tadi realisasi keuangan saat ini sebesar 2,74 triliun atau 24,36%. Jadi sebelumnya kemarin setelah lebaran sebenarnya sudah di 31%, tetapi dengan adanya penambahan terutama terkait dengan yang IKN jadi realisasinya turun. Jadi realisasi fisiknya saat ini juga baru 27,33% di mana penambahan tadi anggaran tadi yang mendukung IKN dan penanganan bencana, ini yang menyebabkan progres dari keuangan dan fisik mengalami penurunan. Perlu kami laporkan pula bahwa pada tahun 2023 Dirjen Perumahan juga melaksanakan rencana aksi afirmatif bangga buatan Indonesia atau penggunaan produk dalam negeri dengan realisasi sampai dengan 12 Juni 2023 adalah sebesar 10,93 triliun atau 98,01%.

Dan kemudian pada tahun 2023 kami, di Direktorat Jenderal Perumahan juga mendorong pengadaan barang dan jasa, terutama untuk Rusun ini baik bangunan fisik maupun mebeler serta PSU melalui pengadaan secara *e-katalog* sehingga dari jumlah total paket di Direktorat Jenderal Perumahan sebesar 747 paket terdiri dari 173 paket yang masih lelang dan 574 paket yang non lelang, jadi ada yang *repeat order*, penunjukkan langsung dan *e-katalog* atau *e-purchasing*. Kami laporkan bahwa dari paket lelang SYC maupun MYC lanjutan Tahun Anggaran 2023, di Dirjen Perumahan sebanyak 173 tadi dengan nilai sebesar 1,97 triliun dengan rincian 116 di antaranya telah terkontrak dengan nilai 101,727 triliun, 4 paket sedang persiapan kontrak senilai 17 miliar, 41 paket sedang proses tahap lelang 177 miliar, 11 paket ini ada yang belum lelang ada 11 paket senilai 48 miliar dan ada satu paket yang gagal lelang yang akan dilaksanakan selanjutnya secara swakelola.

Kemudian untuk paket non lelang dan ini kami laporkan dari 577 paket tadi sebesar 707 miliar rinciannya adalah 186 paket, ini melalui *e-purchasing e-katalog* dengan alokasi 265 miliar, kemudian 145 paket pengadaan langsung, 226 paket penunjukan langsung dan 20 paket dilaksanakan dengan *repeat order*.

Kami laporkan pula realisasi fisik kegiatan Direktur Jenderal Perumahan secara khusus untuk rumah susun, ini baru 29,54% atau capaiannya dari, baru 1.633 unit dari target 5.528 unit. Jadi kemudian untuk rumah swadaya ini padat karya ini sudah 62,07%, jadi ini capaiannya adalah 93.139 unit dari target total 150.000 unit, jadi terdiri dari realisasi BPS dan ada sedikit lanjutan dari NAHP

kemarin. Untuk rumah khusus ini progres baru 10,59%, capaian 350 unit dari target 3.322, tetapi ini ada catatan pula bahwa ada capaian 350 unit rumah khusus yang merupakan unit sementara pembangunan hunian tetap di Sulawesi Tengah yang tersebar di beberapa lokasi.

Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini juga yang belum teralokasi di dalam DIPA, kami juga telah melaksanakan pembangunan yang sudah selesai yaitu 351 unit Huntap pasca bencana di Cianjur yang berada di dua lokasi yang saat ini juga sedang menunggu *review* dari BPKP dan satu lagi penanganan sekitar 100 unit di Kepulauan di... di Pulau Serasan Natuna, untuk bantuan PSU dalam rangka mendorong program sejuta rumah, capaiannya adalah 25,48% jadi ada 7.148 unit dari target 28.050 unit. Jadi ini per 12 Juni ini sudah di SK-kan 38.000, jadinya melebihi target dan masih ada potensi penambahan sekitar 12.000.

Bapak-Ibu sekalian,

Pada kesempatan yang baik ini, perlu saya komunikasikan beberapa hal terutama terkait dengan aspirasi Bapak-Ibu sekalian sebagaimana Bapak menteri, seluruh usulan BSPS ini secara bertahap sudah dilaksanakan jadi tindak lanjut dari Raker kemarin. Jadi usulan-usulan, jadi mohon kiranya usulan-usulan yang belum dilengkapi dengan BNPA dan masih belum sesuai dengan *readiness criteria*, mohon kiranya bisa di, segera diselesaikan dan SK kami buat juga bertahap. Kalau *enggak* salah SK sudah tahap ke-10 dan termasuk tadi pagi yang ada saya tanda tangani, ini supaya bisa secara bertahap bisa segera dilaksanakan, termasuk proses verifikasi hasil kesepakatan yang, yang kita telah lakukan kemarin.

Nah, khusus tadi yang saya sampaikan progres rumah susun juga masih agak lambat, ini tidak bisa terlepas dari beberapa usulan yang belum memenuhi *readiness criteria*. Jadi ini kami juga mendorong agar pemenuhannya dapat dilakukan segera terutama terkait dengan status kepemilikan lahan. Jadi ini mohon kiranya bisa dipercepat agar, ini paling lambat memang bulan ini, karena pertimbangannya adalah waktu konstruksi yang sangat terbatas walaupun pengadaan dengan *e-katalog* bisa berlangsung cepat, tetapi waktu pelaksanaan konstruksinya yang sangat terbatas. Jadi tindak lanjut kesepakatan dari rapat kerja ini, jadi kemarin Bapak-Ibu sekalian, ini karena kepala balai juga kami undang, Bapak undang hari ini, kemarin kami sudah melakukan konsolidasi internal terkait dengan melaksanakan beberapa arahan dan kesepakatan kemarin ya teman-teman semua, untuk kemudian segera dilakukan verifikasi dan pada saatnya segera saya SK-kan untuk kemudian dapat dilaksanakan.

Kemudian kami laporkan juga terkait dengan dukungan untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Jadi yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Perumahan, sejauh ini ada 3: yang pertama adalah pembangunan rumah susun sebagai hunian pekerja konstruksi, ini sebanyak 22 *tower* dengan fasilitas penunjang lengkap yang dapat menampung 10.000 hingga 16.000 orang. Ini telah diselesaikan pada bulan Maret 2023 lalu dan

saat ini telah dimanfaatkan hampir 4.000 tenaga kerja konstruksi yang bekerja di kawasan inti pusat pemerintahan di IKN. Pagu anggarannya 2022-2023 sebesar 569 miliar di mana alokasi tahun 2023 ini ada sebesar 124,9 miliar, realisasi fisik sudah diselesaikan tetapi keuangan memang belum kami bayar 100%, menunggu audit pembayaran yang dilakukan BPKP. Semoga dalam satu minggu kedepan sudah bisa dibayar.

Perlu kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian, pembangunan hunian pekerja konstruksi ini bukan hanya pembangunan konstruksi tetapi sebenarnya adalah bentuk fasilitasi dan transformasi baru terkait dengan industri konstruksi di IKN. Seperti gambar ini kita bangun sebuah ekosistem yang lebih baik di dunia konstruksi, terutama ketika bekerja di proyek yang mungkin masif dan termasuk proyek strategis nasional di IKN. Jadi terkait dengan pekerja konstruksi standar terkait dengan SMKK dan sebagainya, kita berikan tempat tinggal yang layak dengan fasilitas memadai ya, tempat tinggal, kemudian tidak di bedeng-bedeng, kemudian tempat makan juga yang layak dan syukur *alhamdulillah* di fasilitas ini setelah konsep digital ekonomi telah berjalan, salah satunya dalam wujud ekosistem, apa ekosistem digital melalui *cashless society*. Jadi transaksi sudah dilaksanakan secara digital, jadi tidak ada transaksi uang receh begitu lagi di sini gitu.

Kemudian penugasan yang kedua adalah pembangunan rumah jabatan menteri yaitu ada 36 unit dengan total 520 miliar ya di mana anggaran tahun 2023 sebesar Rp335.000.000.000,00 jadi ini diselesaikan secara MYC 2022-2024, realisasi saat ini secara keuangan baru uang muka saja sebesar 5%, 15% dan realisasi progres fisik 11,45%.

Yang ketiga, yang ini penugasan terakhir sebagaimana arahan Bapak Presiden terkait dengan skenario pemindahan ASN, TNI dan Polri, kami ditugaskan untuk membangun rumah susun untuk hunian ASN dan Hankam di IKN sebanyak 47 *tower* dengan pagu anggaran 9,4 triliun secara MYC Tahun 2023-2024 di mana alokasi tahun ini sebesar 3,7 triliun yang bersumber dari BA BUN. Saat ini kegiatan sedang proses tender dan diperkirakan akan terkontrak pada awal Juli 2023 yang pembangunannya dengan segala pertimbangan akan menggunakan teknologi pracetak modular dan sebisa mungkin mengembangkan teknologi volumetrik ya untuk bisa dikembangkan, dibangun di sana, karena Bu Diana lebih banyak membangun konvensional dengan pertimbangan efisiensi sumber daya agar tidak rebutan dengan Cipta Karya, saudara tua, maka kami kita bangun dengan pracetak yang lebih *lin construction*.

Kemudian terkait dengan dukungan dan penanggulangan bencana, perlu kami laporkan bahwa, ini Pak Anwar Hafid *enggak* ada ya, kaitan dengan pembangunan Huntap di Sulawesi Tengah tahap 1 telah kita selesaikan sebanyak 1.679 unit, 100% sudah selesai dan seluruhnya sudah dihuni dan dimanfaatkan. Saat ini sejak tahun 2022-2023, kami lanjutkan pembangunan tahap kedua sebanyak 3.646 unit dengan anggaran 395 miliar. Jadi kita harapkan tahun ini bisa selesai, infrastrukturnya tadi ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Perlu kami sampaikan juga terkait dengan penanganan

bencana alam lainnya yang dilaksanakan secara penanganan keadaan darurat sesuai dengan Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2018, ada beberapa yang alokasinya perlu saya sampaikan belum tersedia dalam DIPA 2023 dan telah diajukan penambahan anggaran melalui BA BUN 99 atas rekomendasi dari BNPB, yaitu pertama adalah pembangunan hunian tetap pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur sebanyak 351 unit beserta Fasos, Fasumnya, saat ini sudah 100% di, yang tahap 1 sebanyak 200 unit telah dimanfaatkan dan saat ini untuk pembayaran dan pengalokasian anggaran sedang menunggu *review* dan audit BPKP agar bisa kita alokasikan pada DIPA Satker di Jawa Barat. Yang kedua, kaitan dengan pembangunan Hutap pasca bencana longsor di kabupaten, di Pulau Serasan Kabupaten Natuna, saat ini sedang berproses progres fisik 51,76% di mana *alhamdulillah* hujan seluruh rumah sebenarnya sudah tertutup atapnya dan percepatan akan kita lakukan semoga di akhir Juni seluruhnya sudah bisa kami selesaikan berikut Fasos, Fasumnya.

Kemudian mungkin Bapak, kedua, kami sampaikan kaitan dengan tindak lanjut temuan BPK, mungkin ringkas saja bahwa kalau kemarin Kementerian PUPR tindak lanjut rekomendasi sudah 80 koma, 80,61% ini khusus untuk Direktorat Jenderal Perumahan telah ditindaklanjuti sebanyak 83%, Pak. Jadi ya lebih tinggi sedikit dan sisanya saat ini sedang berproses beberapa tinggal menunggu dari tindak lanjut SIPTL BPK RI dan beberapa sedang berproses di Inspektorat Jenderal Direktorat Kepatuhan kami dan ada yang masih teman-teman harus selesaikan tapi jumlahnya tidak terlalu banyak.

Selanjutnya, kami masuk ke bagian ketiga, ini terkait dengan tadi mungkin saya kaitan dengan tema RKP, mungkin kami tidak mengulang lagi yang sudah disampaikan oleh Bu Dirjen, tetapi kami perlu lanjutkan bahwa terkait dengan prioritas penganggaran pada tahun anggaran 2024, prioritasnya antara lain yang pertama adalah kegiatan MYC atau kegiatan-kegiatan lanjutan termasuk di antaranya adalah IKN. Yang kedua, tentunya sepakat dengan Bapak-Ibu sekalian, prioritasnya adalah kegiatan padat karya. Yang ketiga ini menjadi tanggung jawab kita bersama adalah penanggulangan bencana, baru selanjutnya adalah kegiatan prioritas baru dan dukungan manajemen dan *output* non fisik lainnya, yang ini juga sudah telah kami efisiensi. Khusus untuk OPOR, saya mengambil kebijakan bahwa OPOR akan coba kita paksa untuk kita selesaikan di tahun 2023 sehingga tahun 2024 lebih berfokus kepada pemanfaatan serah terima aset dan pemanfaatan agar di tahun 2024 seluruh aset yang terbangun bisa menerima manfaat dan dinikmati oleh penerima bantuan.

Perlu kami laporkan bahwa pagu indikatif tahun 2024 berdasarkan yang diterima oleh Direktur Jenderal Perumahan, merujuk dari surat Bapak Menteri PUPR adalah sebesar 6,191 triliun. Jadi kalau mengacu kepada kronologisnya perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Renstra kebutuhan pagu Ditjen Perumahan di tahun 2024 adalah 15,65 triliun. Namun, apabila mempertimbangkan *gap* terhadap pemenuhan target renstra tersebut dari tahun 2020 hingga tahun 2023 maka kebutuhan pagu seharusnya adalah sebesar 25,17 triliun, ini termasuk kebutuhan pembangunan IKN sebesar 5,76 triliun yang tidak masuk di dalam Renstra.

Kemudian berdasarkan alokasi pagu indikatif yang diterima Dirjen Perumahan sebesar 6,19 tadi, ini perlu kami laporkan bahwa 4,55 triliun di sini diantaranya adalah anggaran untuk IKN ya. Jadi ini 4,55 ini adalah bagian dari 27 triliun anggaran IKN yang diterima PUPR dari kebutuhan sebesar 33 triliun di tahun 2024. Kalau tadi Bu Diana 9 koma sekian, saya baru ke bagian 4,55 saja dari kebutuhan sesungguhnya adalah 5,7. *Nah*, kemudian sisanya adalah satu untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis, ini gaji dan sebagainya adalah sebesar 0,058, *eh* 0,58 triliun dan ada pagu bebas itu hanya satu triliun dan satu triliun ini seluruhnya dialokasikan untuk padat karya. *Nah*, kemudian terkait dengan *exercise* dari target dari pagu tadi untuk dukungan manajemen teknis yang 0.59 tadi ini terbagi atas belanja operasional dan non operasional yaitu sebesar 0,32 triliun dan dukungan lainnya, jadi dukungan teknis lainnya itu 0,27 triliun.

Kemudian untuk pembangunan Rusun ini, ini juga mayoritas hanya IKN 4,45 triliun dan untuk MYC ini baru teralokasi untuk satu *tower* saja, di mana kekurangan untuk IKN ini juga masih ada 1,22 triliun dan kekurangan untuk MYC, jadi ini juga *committed* sebesar 1,01 triliun juga.

Kemudian program padat karya dengan skema BSPS ini anggarannya 1 triliun dengan target 45.872 yang akan menyerap 91 ribu 740 ribu tenaga kerja. Jadi perlu kami sampaikan pula, adapun anggaran untuk penambahan program padat karya, kemarin ada kesepakatan sementara adalah 75.000 telah kami sampaikan kepada Bapak Menteri dan secara resmi ya, Pak (*suara tidak jelas*), kemarin sedang dalam, sudah kami usulkan kepada Pak Menteri agar menjadi pertimbangan untuk di dalam tahap selanjutnya yaitu di dalam tahap pagu anggaran alokasi perubahan dalam pagu anggaran.

Kemudian untuk pembangunan rumah khusus ini ada 0,14 triliun, ini juga prioritasnya untuk penyelesaian yang IKN. Kemudian ada alokasi ini *loan* jadi hanya 13,45 miliar untuk lanjutan pembangunan Huntap yang lebih berfokus kepada penyelesaian penuntasan dan serah terima aset, serta ada anggaran 20,98 miliar ini untuk penanganan bencana. Jadi ini juga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar 290 miliar untuk pembangunan rumah khusus. Jadi beberapa lokasi yang terdapat bencana telah ditetapkan dan tidak teralokasi di 2022 karena *rediness criteria* nya belum terpenuhi digeser ke 2024 juga masih belum tersedia anggarannya.

Untuk PSU ini hanya 9 miliar saja, ini masih sangat memprihatinkan karena ini hanya 820 unit, ini masih ada kekurangan juga sebenarnya 289 miliar karena ini juga sangat strategis untuk mendukung pencapaian program sejuta rumah, karena ini adalah bentuk fasilitasi subsidi lainnya. Sama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, kami perlu laporkan, kami juga belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di 4 daerah otonomi baru di Papua. Secara usulan kami telah melakukan penajaman termasuk terkait dengan perumahan ada skema-skema yang akan kita siapkan. Jadi tidak semuanya akan dibangun sebagai rumah jabatan atau rumah dinas, tapi kami juga dorong beberapa pengembangan rumah terutama untuk ASN yang akan bertugas di sana, di level staf atau pejabat yang mungkin di eselon yang di

bawah untuk ke arah rumah milik, Pak. *Nah*, nanti ada fasilitasi-fasilitasi baik itu mungkin FLPP dan sebagainya, itu yang kita dorong. Sekaligus juga menggerakkan sektor riil di dunia properti agar di sana tidak seluruhnya membebani APBN tetapi juga sektor swasta dapat berperan secara aktif.

Baik.

Bapak-Ibu sekalian,

Pada kesempatan ini juga, kami seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perumahan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama mitra yang sangat baik agar dalam kelancaran beberapa pekerjaan di kami khususnya BSPS kemudian rumah susun. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama, yang kita hajatkan bersama untuk seluruh kesejahteraan masyarakat kiranya dapat diterima, dinikmati dan bermanfaat. Dan kami sekaligus atas nama jajaran mengucapkan terima kasih dan teriring permohonan maaf apabila di dalam koordinasi selama ini baik kami di jajaran di pusat maupun teman-teman balai di daerah izinkan saya selaku Direktur Jenderal Perumahan memohonkan maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Dirjen.

Demikianlah penyampaian Ibu Dirjen, Bu Diana dalam hal ini dan Pak Iwan sebagai Dirjen Perumahan. Sekarang sampailah pendalaman dari Anggota yang terhormat.

Sekarang sudah menunjukkan waktu jam 3 lewat 35 menit, yang mau bertanya di sini ada tercatat, tercatat tapi saya yakin ini adalah tercatat sebelum kita rapat internal tadi. Jadi ada kurang lebih 17 orang, waktu kita tinggal, kalau bisa kita selesai jam lima atau setengah enam.

Baik, saya persilakan dulu barangkali yang pertama Pak Sumail, ada? tidak ada? yang ada saja, saya cek ya, Bu Cen, silakan Bu Cen ada?

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Ada, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada Pak Sumail?

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Siap, siap.

KETUA RAPAT:

Oh ada, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita batasi ya, kalau bisa 2 menit ya, tinggi-tinggi 3 menit, tinggi-tinggi 3 menit, tinggi-tinggi.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Singkat, padat dan langsung fokus ke sasaran.

KETUA RAPAT:

Betul, betul, betul.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, dan juga Bu Dirjen, Pak Dirjen, segenap para Kepala Balai, baik dari Ditjen Cipta Karya dan Perumahan dari seluruh Indonesia,

Ini luar biasa rapat pada kali. *Nah*, ini tentu harapan kami adalah ke depan bisa berkoordinasi dengan baik dan berkomunikasi katanya buat kebutuhan-kebutuhan yang ada di Dapil. Pastinya saya ingin di awal saya ingin mengucapkan dan juga ini pesan dari titipan salam dari masyarakat di Dapil terima kasih yang banyak katanya dengan Ibu Dirjen dan Pak Dirjen, katanya dengan beberapa kegiatan yang sudah capaiannya hampir 90%, tentu tahun-tahun ke depan bisa ditingkatkan kembali.

Pertama, saya akan berikan catatan terhadap Direktorat Jenderal Perumahan, kaitannya dengan apa namanya, yang menjadi persoalan klasik katanya *backlog* antara ketersediaan dan kebutuhan, antara ketersediaan anggaran kebutuhan kaitannya dengan di mana masyarakat-masyarakat perkotaan yang padat penduduknya. Tentu ini perlu afirmasi dari pemerintah agar kiranya masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah itu bisa tertampung, Pak, dan dapat difasilitasi secara perumahan.

Yang kedua Pak Dirjen, kami senantiasa berada di Dapil, maksud kami di minggu-minggu terakhir ini masih melihat ada beberapa apa namanya,

lingkungan-lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, itu lingkungannya jalan-jalannya masih belum beraspal. Tentu nanti mungkin melalui Kepala-Kepala Balai yang ada di masing-masing wilayah untuk mencatat dan kemudian memberikan fasilitasi kegiatan ataupun program yang di sana sehingga mereka juga merasakan bahwa pembangunan itu bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Dan yang berikutnya kepada Ibu Dirjen. Bu Dirjen, ini juga berkaitan dengan Direktorat Jenderal Perumahan. Pak Dirjen, Bu Dirjen, di Muncar itu adalah kawasan industri perikanan, Pak, dan di situ banyak sekali nelayan-nelayan dan merupakan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia maka karena banyaknya nelayan-nelayan yang tidak punya perumahan, perlu, Pak, di *introducir* atau di *endorse*, ada satu perumahan khusus kaitannya dengan para nelayan yang ada di sana. Kaitannya dengan limbah-limbah Ibu, industri itu sudah banyak mencemari, apa namanya, perairan, sehingga semakin tahun dari tahun ke tahun produksi daripada hasil tangkapan mereka itu juga menurun. Hasil dari, hasil kajian dari lingkungan hidup yang ada di Jawa Timur menunjukkan bahwa laut di perairan Muncar sudah mulai tercemar karena adanya limbah-limbah yang ada di sana.

PESERTA RAPAT:

2 menit, 2 menit.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Yang, 2 menit, baik. Penting ini Ibu Dirjen, ini titipan daripada masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Singojuruh, Desa Temuguruh namanya Dusun Tojo, di sana ada petilasan yang menurut mereka-mereka, beliau-beliau ini perlu kita lestarikan pelestarian adat dan budaya karena di situ merupakan tempat bertemunya para guru menurut keyakinan beliau dan pada tahun-tahun, maksud saya, pada bulan-bulan tertentu puluhan ribu orang datang ke sana, Ibu, maka perlu penataan untuk kawasan religi di sana ya, Desa Temuguruh Dusun Tojo dan Kecamatan Singojuruh. Saya kira itu yang paling penting bagi saya.

Yang terakhir Pak, mungkin kalau tidak, belum siap DED nya segera disiapkan, Bu karena menyangkut bahwa puluhan ribu orang datang ke sana tetapi kawasannya belum tertata sedemikian rupa.

Demikian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, 2 menit, 2 menit.

Sekarang, Pak Irwan. Silakan, Pak Irwan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. Ir. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Langsung.

KETUA RAPAT:

Langsung aja *enggak* pakai hormat, Pak.

F-P. DEMOKRAT (Dr. Ir. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Enggak afdol kalau enggak hormat

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V serta rekan-rekan Komisi V yang saya banggakan,

Yang saya sangat hormati, muliakan Bu Dirjen Cipta Karya, Pak Dirjen Perumahan, para direktur serta seluruh jajaran Kementerian PUPR, khususnya para Kepala Balai baik Direktorat Cipta Karya maupun Direktorat Perumahan yang hadir pada rapat hari ini, khususnya mitra saya, Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kaltim, Bung Indra dan Pak Hujarat Kepala Balai Penyediaan Perumahan.

Terima kasih, kerjasama yang luar biasa untuk terus membangun Kaltim.

Pertama-tama tentu saya sampaikan terima kasih ya tahun ini Bu Diana kita ada rehab sekolah yang sudah akan selesai di September nanti dan saya berharap akan ada lanjutan rehab sekolah di tahun ini sampai dengan tahun depan.

Kemudian terima kasih juga untuk KOTAKU skala kawasan yang di Bontang yang akan dilaksanakan tahun ini berikut SPAM Hulu. Bu Diana dan Bu, Pak Iwan, Dirjen Perumahan, saya hanya ingin mengingatkan, tadi disampaikan untuk 2024 IKN itu 27 triliun ya, tahun ini 22 triliun, luar biasa ya, bahasanya itu triliunan tapi saya ingin mengingatkan bahwa walaupun kemudian tahun depan beberapa yang kita bangun itu fungsional di IKN, kalau kemudian kita lupa di sekitar penyangga IKN ini saya parkir *eh* saya pikir pasti akan jatuhnya adalah ketimpangan, kesenjangan sehingga kami sangat berharap diperhatikan juga gitu ya. Jangan sampai kemudian bangunan-bangunan ini terbangun kemudian tahun depan di kota-kota penyangga ini justru jadi tertinggal ya fasilitas-fasilitasnya, terutama dalam kesempatan ini kami ingin mengusulkan di Balikpapan itu SPAM-nya masih kurang. Saya berharap tahun depan ada pembangunan apa namanya fisik untuk SPAM Balikpapan, syukur-syukur bisa dimulai tahun ini, termasuk juga apa namanya anak-anak sekolah di sekitar IKN di Sepaku, di Penajam juga SPAM-nya untuk di PPU, Penajam Paser Utara ini betul-betul *ring* 1 IKN *nih* ya. Sementara untuk Dirjen Perumahan, untuk ASN di Bontang kami berharap bisa dibangun Rusun untuk ASN di Bontang, di Kota Bontang.

Saya pikir itu saja Pimpinan, terima kasih banyak, singkat tapi *InsyAllah* dikabulkan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

F-P. DEMOKRAT (Dr. Ir. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Izin menyerahkan *nih*.

KETUA RAPAT:

Lanjut, lanjut ya.

Bu Cen, Pak Tubagus, silakan. Bagi yang ingin menyerahkan silakan serahkan saja semua masing-masing, supaya jangan dua kali kerjanya, ayo, boleh-boleh, langsung-langsung, yang ingin menyerahkan langsung kita buat waktu. *Wah*, ini luar biasa *nih* padat, padat karya namanya, padat karya itu. Terima kasih Pak Dedi ya.

Bu Cen Sui Lan.

F-P. GOLKAR (CEN SUI LAN):

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Bu Dirjen, Pak Dirjen dan jajaran dan seluruh Ka.Balai
yang hadir pada hari ini,**

Saya langsung saja, Bu Dirjen, saya mau mengajukan revitalisasi sekolah, jadi ada di Tanjung Pinang namanya SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Sedikit ingin saya sampaikan, ruang belajar yang diperlukan saat ini 5, ada 52 kelas tetapi yang tersedia 35 kekurangan 17 kelas itu dengan kerusakan yang dialami sangat parah sehingga anak-anak itu kalau belajar harus berpindah-pindah. Berpindah artinya dia tidak punya kelas satu kelas pasti, dia sekolahnya belajarnya di laboratorium, di lapangan bahkan di satu kelas itu bisa berganti-ganti. Jadi sangat mohon penanganan agar bisa direalisasikanlah karena ini mendesak Bu Dirjen, karena dengan siswa 1.800 ribu lebih. Jadi mereka *enggak* ada solusi menunggu DAK, *enggak*, *enggak* dapet, anak-anak itu sangat miris sekali keadaannya. Jadi mungkin nanti balai atau Bu Direktur bisa mensurvei, nanti bareng dengan tim saya. Itu untuk Bu Dirjen juga ada saya ingin mengajukan penanganan kawas, kawasan Kota Pusaka di Lingga, Penyengat itu udah masuk tahap kedua dan udah hampir selesai, saya ingin mengajukan untuk Kabupaten Lingga Bu Dirjen, jadi mungkin nanti tolong di inikan Bu Dirjen ya.

Yang kedua ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, di Lingga itu kan kalau bantuan BPS kepada rumah nelayan itu di pesisir-pesisir pantai itu, itu 20 juta itu tidak cukup Pak Dirjen, mengapa? mereka itu pakai kayu semua dan kalau saya lihat penanganan itu tidak, tidak menyentuh apa sekali, karena dua, tiga tahun akan rusak lagi. Jadi mungkin kita bisa pikirkan itu rumah khusus untuk nelayan karena kalau di mereka rumahnya berdiri di atas laut itu. Jadi mungkin itu yang saya ajukan nanti untuk BPS Lingga mungkin kita atur bisa kita ajukan rumah khusus.

Jadi itu aja Pak Dirjen, terima kasih, saya rasa sudah selesai dan yang lain-lain juga itu aja. Terima kasih, Pak, Pak Ketua, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Cen.

Pak Willem? Cukup? Silakan Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Baik.

Pak Ketua, dan juga kawan-kawan Anggota Komisi V, Dirjen Perumahan dan Cipta Karya serta seluruh jajaran yang kami hormati,

Dari kami sedikit saja ingin mengingatkan bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah 2023 yang bertemakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Itu wilayah kami di, baik kami di Timur Indonesia maupun di luar pulau itu sebenarnya kami masuk dalam kategori 5, itu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar. Namun berbagai syarat dan kriteria yang dibuat oleh pusat, itu seringkali bukan seringkali, sering terjadi kami diabaikan dalam penyerapan program dan juga aspirasi sehingga oleh karena itu kiranya perlu melakukan pendekatan-pendekatan lain. Misalnya kami di Papua itu bisa menggunakan pendekatan *local wisdom*, tidak bisa menggunakan pendekatan yang cenderung penyamaan definisi dan diperlakukan sama se-Indonesia dan kalau dengan demikian maka kami tidak akan... sulit untuk menyentuh program-program yang ada di komisi kami. Itu yang bisa dapat kami sampaikan. Seperti halnya, kami di sini adalah seperti halnya program-program yang ada di Dirjen Cipta Karya, singkatnya bisa kami dapat sampaikan seperti itu.

Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Willem, terima kasih.

Pak Boyman.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan,

**Seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,
Ibu Dirjen Cipta Karya, Bapak Dirjen Perumahan, Ka.Balai Cipta Karya
Kalimantan Barat Pak Deva, Ka.Balai Perumahan Pak Andi Suganda.**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsung saja Ibu, pertama-tama SPAM. SPAM di kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Kedua, SPAM Kecamatan Kendawangan, kemudian, Bu, MIN 1, MIN 1 sekolah MIN 1 di Pontianak itu DED nya sudah masuk, semoga 2024 ini jangan sampai *enggak* dilaksanakan lagi Bu, sudah parah keadaannya. Kemudian Ibu Dirjen, beberapa sekolah yang sudah kita usulkan di 2023 di Kayong Utara, di Kabupaten Sambas dan Ketapang, semoga di 2024 ini bisa direalisasikan karena sampai sekarang anak-anaknya sekolah itu masih belum bisa menempati sekolah itu, dan itu menurut saya, Pak Deva sudah sangat tahu, videonya sudah lengkap itu. Terima kasih, Ibu.

Kalau untuk Dirjen Perumahan, Pak, kami terima kasih atas segala program padat karya yang sudah Bapak sampaikan ke kami seluruh Anggota Komisi V ini. Semoga ke depan tetap berlanjut dan menurut kami padat karya, bedah rumah itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat yang memang kurang mampu, saya pikir di seluruh Indonesia.

Saya pikir itu, Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Boyman.

Pak, Ibu Sadarestuwati.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA):

Terima kasih, Pimpinan,

**Pak Dirjen,
Bu Dirjen dan seluruh jajaran, serta
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V,**

Saya langsung saja berkaitan dengan program-program dari kementerian, khususnya Cipta Karya dan perumahan. Saat ini untuk perumahan, saya mendapatkan program untuk penataan kawasan di Dusun Papringan, memang hampir semua, hampir semua rumahnya memang harus dibedah, ini sudah dilaksanakan namun tentunya membutuhkan kerjasama juga dukungan dari Cipta Karya berkaitan dengan beberapa yang harus segera di, di apa, ditata, saya juga sudah berkomunikasi dengan balai untuk hal ini .

Kemudian, tadi saya menyampaikan berkaitan dengan sekolah yang sekolah negeri ya, tetapi memang sangat membutuhkan. Jadi saya kira itu perlu kebijakan khusus dan ini saya di halaman 43, ini ada dalam rencana program padat karya, penanganan kemiskinan ekstrim yang memang saat ini masih boleh dibilang cukup besar, akan tetapi penanganan ini khususnya ini untuk Cipta Karya ini, penanganan kemiskinan ekstrim ini sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Desa, ini bertentangan di mana Kementerian Desa ini hampir boleh dikatakan memaksa desa-desa, ini saya bukan katanya tetapi saya langsung turun dan mendengar apa yang disampaikan oleh Kades. Dan saya melihat sendiri, desa-desa yang masih sangat butuh bantuan termasuk rumahnya juga masih banyak yang tidak layak infrastruktur juga masih belum selesai, tetapi dipaksa untuk menjadi desa yang maju dan mandiri sehingga desa-desa maju dan mandiri ini otomatis tidak bisa menerima program-program dari kementerian. Sementara Kementerian Desa ini menuntut karena ini kan untuk mendapatkan penghargaan tersendiri, *mento*, untuk apa, dengan mengorbankan dari desa-desa yang dipaksa. Bahkan desa-desa pinggiran itu sudah dijadikan Desa Mandiri. Kemarin minggu lalu mereka berkeluh kesah, Bu, bagaimana ini kami tidak bisa mendapatkan program apapun dengan dijadikan sebagai Desa Mandiri.

Untuk itu, perlu kiranya dari pemerintah khususnya juga dari kementerian tentunya untuk bisa melihat langsung dan juga mencari solusi bagaimana desa-desa yang memang masih sangat membutuhkan bantuan karena data yang diberikan atau yang dirilis oleh Kementerian Desa, saya yakin, *haqul* yakin itu belum, belum benar adanya ya, karena memang kenyataannya seperti itu sehingga desa-desa tersebut masih bisa dijangkau dengan program-program yang dari Kementerian PUPR. Kalau tidak ya mereka boleh dikatakan menjadi korban dari kebijakan salah satu kementerian.

Saya kira itu saja dari saya. Tentunya saya terima kasih, sudah banyak sekali program-program yang bisa saya berikan baik itu Perumahan maupun dari Cipta Karya. Ya, tentunya kami berharap kerjasama ini akan terus bisa kita jalin dengan baik program-program juga semakin banyak.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, terima kasih Bu Estu.

Pak Irmawan.

F-PKB (H. IRMAWAN, S.Sos., M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi V beserta Bapak-Ibu Anggota Komisi,
Yang kami hormati Bapak Dirjen Perumahan, Ibu Dirjen Cipta Karya beserta staf dan jajarannya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini,**

Pertama sekali, saya ingin ke Dirjen Perumahan dulu, Pak. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian PUPR, dalam hal ini Dirjen Perumahan, yang mana selama ini telah mengalokasikan pembangunan Rusunawa untuk lembaga pendidikan baik itu pendidikan swasta seperti pondok pesantren maupun pendidikan negeri seperti perguruan tinggi. Ternyata program ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka oleh karena itu kami berharap kepada Dirjen Perumahan untuk tahun yang akan datang ini kalau memungkinkan anggaran kita agar jumlahnya diperbanyak lagi karena di Aceh itu, Pak, masih banyak sekali pondok-pondok pesantren yang masih membutuhkan sentuhan dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan Rusunawa ini. Seperti contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu kami pernah berdiskusi dengan salah satu guru besar dari Universitas Syiah Kuala, ternyata Universitas Syiah Kuala juga masih sangat membutuhkan, Pak, karena kian hari mahasiswanya semakin banyak sehingga lembaga pendidikan tersebut punya keterbatasan untuk menampung mahasiswa dalam hal pemondokan. Oleh karena itu, saya berharap di Tahun Anggaran 2024 ini, kalau memang anggarannya tersedia saya mengusulkan kepada Bapak agar dapat dibangun satu unit Rusunawa di kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Kemudian juga kami sampaikan kepada Dirjen Perumahan terkait dengan pembangunan Rusunawa di Tahun Anggaran 2022 yang lalu karena di Aceh ada beberapa titik Pak Ruslan ya, sampai hari ini pelaksanaannya masih mangkrak karena rekanan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal sehingga pihak pemerintah dalam hal ini Balai Perumahan dengan terpaksa harus memotong kontrak sehingga bangunan tersebut jadi terlantar. Jadi oleh karena itu, saya pikir ini harus ada solusinya, Pak, jangan kita biarkan

bangunan ini tidak jadi, kemudian tidak dapat fungsional dan dikhawatirkan kalau tidak cepat kita tangani akan timbul persoalan hukum nantinya.

Jadi saya berharap ini agar dapat diselesaikan dalam waktu yang dekat ini, kita carikan solusinya. Itu saya pikir yang ingin saya sampaikan kepada Dirjen Perumahan.

Kemudian ke Dirjen Cipta Karya, ada satu kawasan, Bu, di Kota Banda Aceh itu namanya daerah Ulee kareng, kami menyebutnya Simpang Tujuh dan daerah ini adalah daerah yang sedikit kumuh kondisinya dan padat dengan kendaraan sehingga setiap harinya sering terjadi kemacetan dan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kami dari Komisi V melakukan kunjungan spesifik ke Banda Aceh dan kami telah meninjau lokasi tersebut dan pada saat itu kita berdiskusi dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh sudah menyiapi, sudah menyanggupi bahwa dia akan menyiapkan DED nya, kemudian dia juga akan membebaskan lahannya, hanya saja pembangunan fisik penataan bundaran tersebut yang perlu kita intervensi dari anggaran APBN.

Saya berharap kepada Ibu, ini juga bisa menjadi prioritas kita di Tahun Anggaran 24 ini, karena ini sudah kita janjikan ketika kami, Bu Cen, juga ikut pada saat itu ke Aceh untuk memberi jaminan kepada masyarakat bahwa ini akan dibangun dengan APBN, Bu Cen sebagai saksi.

Kemudian ada beberapa daerah juga, Pak, di Aceh seperti Aceh Tenggara, Gayo Lues yang bermasalah dengan air minumnya. Jadi perlu pembangunan SPAM di Aceh Tenggara. Kalau saya tidak salah Aceh Tenggara ini sudah berapa kali mengajukan proposal Ke Dirjen Cipta Karya untuk minta bantuan pembangunan SPAM di Aceh Tenggara, Pak, tapi sampai hari ini juga tidak terealisasi. Kemudian di Aceh Singkil, ada daerah pesisir pantai di sana, di Kecamatan Singkil dan Kecamatan Singkil Utara, selama ini tidak pernah dapat jaringan air bersih di situ, Bu. Jadi kita kasihan melihat masyarakat di sini. Saya berharap di Aceh Singkil juga bisa kita alokasikan di tahun 2004 ini untuk pembangunan SPAM dan termasuk di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Gayo Lues juga sangat membutuhkan pembangunan SPAM, itu mungkin Ke Dirjen Cipta Karya.

Kemudian satu lagi, Bu, terakhir barangkali. Tadi di paparan Ibu, kami telah melihat ada pembangunan *venue*, untuk persiapan PON Sumut-Aceh. Kalau saya tidak salah di Aceh tadi ada 13 titik yang akan kita renovasi, tapi sampai hari ini kami belum melihat ada aktivitas di sana, Bu. Sementara waktu PON sudah semakin dekat. Jadi saya berharap kepada Ibu Dirjen agar kegiatan PON ini dapat terlaksana dengan baik, saya pikir ini sudah waktunya untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan PON di Aceh ini dapat terlaksana dengan baik apabila *venue-venue* nya dan pemondokan-pemondokan atletnya sudah kita bangun dengan rapi.

Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wallahul muaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Pak Irmawan.

Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B KADY, MS):

*Bismillahirrahmanirrahiim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen, Ibu Dirjen dan seluruh jajarannya, Ka.Balai,**

Hanya ada tiga poin menjadi catatan saya. Yang pertama, tentu saya memberikan apresiasi atas capaian yang telah dicapai sampai pada saat sekarang ini sekitar 24% dan rata-rata antara 24 sampai 25% baik Ibu Dirjen maupun Pak Dirjen. Ini capaiannya saya kira walaupun saya disampaikan tadi bahwa lebih tinggi daripada tahun 2022, tapi saya pikir tentu harus digenjut lagi supaya lebih cepat selesai persoalannya ya. Itu catatan saya yang pertama.

Yang kedua, untuk Pak Dirjen Perumahan. Tadi saya dengar ada dana dana BUN ya Pak ya, oke, ini tadi saya diskusi dengan Pimpinan, hampir semua penggunaan dana BUN itu tidak dibahas oleh Komisi V sejak dari awal ya. Oleh karena itu, barangkali nanti ke depan Pak Dirjen atau Ibu Dirjen dan seluruh kementerian yang ada, karena yang dibahas di sini tentu apa yang kita anggar dan bahas dan disetujui oleh Komisi V, tapi memang saya tahu persis bahwa dana BUN itu, dana BUN itu memang dana cadangan untuk apa namanya, bencana alam dan sebagainya, tetapi ada juga yang tidak masuk di situ. Ini menjadi catatan baik nanti di Badan Anggaran akan kami cek karena masalahnya adalah semua ini merupakan pengeluaran negara.

Dan yang ketiga, ke Ibu Dirjen, terima kasih, saya dengar *Insyallah* ya pembangunan SPAM Mamminasata sudah mulai teken kontrak ya, Bu ya, ini luar biasa dan saya kira segera dilakukan karena daerah itu memang sangat membutuhkan SPAM itu.

Saya kira itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka.

Pak Ruslan. Tidak bicara? sudah selesai?

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MCOMN&MEDIASST):

Pimpinan, izin, mau serahkan saja.

KETUA RAPAT:

Oh silakan, silakan, ya, ya, silakan, silakan Bu Irene serahkan. Terima kasih Pak Ruslan ya, itu yang benar Pak Ruslan ya.

Pak Syarif *enggak* ada ya? Pak Syarif masih mau ngomong lagi atau sudah tidak lagi? Ya, sudah, silakan, silakan, dua menit katanya Pak Robert.

F-P. NASDEM (SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Selamat sore dan salam sejahtera Pimpinan Rapat, Anggota Komisi V yang saya hormati,
Bapak Dirjen Perumahan, Bapak Dirjen Cipta Karya beserta seluruh jajaran,**

Pertama berkaitan dengan secara umum terhadap program-program yang sudah di 2023, tentu ini merupakan satu hal yang juga kami berikan apresiasi, terutama di BSPS, Pak, BPS dan Ibu di PISEW, Bu, rupanya itu program yang sangat menyentuh langsung termasuk Sandes ya. Pada umumnya ya tentu ini merupakan satu hal yang perlu menjadi perhatian dan juga saya kira cukup membantu bahkan ada beberapa kabupaten di daerah kami yang tadinya *stunting* sekarang sudah meningkat hilang *stunting*. Ini saya kira tidak terlepas juga program-program yang Bapak lakukan, saya kira ini program yang memang perlu untuk terus kita lakukan dalam rangka untuk mempercepat terhadap penuntasan, kalau tidak penuntasan berkaitan dengan *stunting* dan isu sosial lainnya.

Yang kedua, berkaitan dengan masih ada beberapa program yang belum tuntas berkaitan dengan Ibu Dirjen Cipta Karya mungkin masa sekolah yang sudah diverifikasi itu sampai kemarin belum juga turun itu, Bu. Saya mohon perhatian itu karena memang sekolahnya cukup, rusaknya cukup berat, sehingga anak-anak itu kalau musim hari hujan mereka harus dihentikan sekolahnya karena memang perlu untuk perhatian untuk itu. Saya kira mohon perhatian-lah untuk Ibu.

Kemudian di *anu*, mungkin kemarin cuma yang relokasi berkaitan Rusun itu, Pak, untuk yang yang terakhir, yang revisi.

Kemudian untuk program di 2024 ya, kembali saya mengusulkan kaitan dengan ini terutama di Cipta Karya, lanjutan terhadap DED yang sudah, sudah selesai itu, Bu, mungkin mulai untuk fisiknya berkaitan dengan rehabilitasi pemakaman Kesultanan Pontianak, karena itu sudah masuk destinasi wisata religius.

Yang kedua, berkaitan dengan pencapaian untuk pemenuhan air bersih, yang saya sampaikan kemarin di Kubu Raya itu dari 600 ribu penduduknya baru tercapai sekitar 10 sampai 15% yang menikmati air bersih. Kemudian saya mengusulkan kembali nanti kami sampaikan berkaitan dengan penambahan untuk peningkatan pipanya dari menjadi 200 liter per detik. Kemudian ada berkaitan dengan apakah masuk nanti KOTAKU atau program lain dalam penataan lingkungan, Bu? itu di situ ada destinasi juga wisata di daerah ini kebetulan di wilayah saya yang sudah berapa kali juga kita usulkan, di situ ada klenteng tua, kemudian juga itu sudah ratusan tahun dikaitkan dengan lokasi yang berhadapan dengan laut dan ini merupakan tempat kuliner di sana, dan juga ini sekarang sudah menjadi salah satu juga berkaitan dengan ya, di daerah Kubu Raya di Kecamatan Sungai Kakap. Ini mungkin beberapa hal kaitan dengan itu, kemudian terakhir peningkatan yang di Senakin Bu, air bersih di Kabupaten Landak.

Semuanya itu nanti akan saya sampaikan secara tertulis. Saya kira itu saja, Pak.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Syarif.

Ibu Novita Wijayanti.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota, Bu Dirjen, Pak Dirjen dan seluruh Ka.Balai dan semua pejabat yang saya hormati,

Langsung saja. Tadi ada apa, pejabat-pejabat baru, Bu Dirjen dan Pak Dirjen, mohon nanti mungkin ke sekretariat dikasih supaya bisa *update* karena kan cepat perputarannya, kalau kita mau cari udah ganti gitu, minta di *update* apa namanya, data nomor telepon direktur dan semuanya.

Kemudian Bu Dirjen, terima kasih, dulu Ka.Balai, Pak Cakra komunikasi bagus sekali sampai turun ke Dapil saya Cilacap-Banyumas. Jadi selamat sudah naik jabatan ya, selamat, selamat, selamat, kemudian penggantinya diharapkan juga komunikasinya harusnya minimal seperti Pak Cakra atau bisa lebih baik lagi karena di Jawa Tengah banyak Anggota Dewannya dari berbagai macam partai.

Berikutnya saya minta yang itu aja, Dapil, kemarin waktu ada Pak Menteri, saya sudah sempat beberapa usulan saya sampaikan, Bu Dirjen, mungkin sudah dicatat gitu atau belum. Yang pertama apa namanya, ada penataan Srandil Selok di Cilacap, kemudian, ya nanti banyak kan programnya terima kasih ini apa menyangkut masyarakat, jadi nanti akan berlanjut ya, Bu, ya usulannya.

Kemudian SK yang PISEW 1 yang di Cilacap, Bu, ditunggu sekali karena akan segera dilaksanakan ada yang perpindahan dari Cilacap itu satu aja, ditunggu karena, ditunggu keputusan dari Bu Dirjen. Berikutnya, usulan-usulan lain nanti disusulkan Bu Dirjen.

Dan Pak Dirjen, Pak Iwan makasih programnya dan apa namanya, aspirasi yang non Dapil baik di Jawa Tengah maupun yang tidak di Jawa Tengah karena saya ada yang beberapa juga tidak di Jawa Tengah, ada di Banten, Jabar minta tolong segera SK-nya ditunggu, karena udah ribut terus sama saya.

Kemudian apa *nih*, makasih kemarin apa namanya Taruna Nusantara, Cipta Karya dan Perumahan mungkin ini sinergi dua ya, Pak Cakra, di sana terima kasih sudah turun, ini loncat lagi berarti ke Pak Dirjen usulan yang Unsoed jangan lupa, Rusunawa, sudah ya? makasih, dan yang pembangunan di Cilacap nanti mungkin di tahun 2024, kalau Rusunawa kan yang di Banyumas, kalau ini yang di Cilacap yang kemarin juga saya sampaikan, itu.

Yang terakhir, saya ingin tahu tentang IKN, Bu Dirjen sama Pak Dirjen. Tadi sempat disampaikan Pak Dirjen dapat 4,5 Bu Dirjen 9,5 kemudian pembangunan sudah dimulai dari 2023 berlanjut di 2024, pembangunan, pembangunan, pembangunan, kemudian juga bahkan tadi ada *slide* yang 500 miliar untuk rumah, 36 rumah menteri kalau *enggak* salah, berarti satu rumahnya sekitar 14 miliar lebih ya kalau *enggak* salah ya, itu secara keseluruhan. Yang ingin saya tanyakan apa, ini target keseluruhannya selesainya berapa tahun, tahun keberapa, kemudian gedung DPR itu dibangunnya kapan dan konsepnya *nih* karena saya *enggak* ngerti, konsepnya kalau kita itu di sana itu apa tinggalnya di mana karena belum sempat disampaikan. Ya, kita mau tau aja dengerin gitu, iya, pada *enggak* mau ke sana ya, mau rapatnya di sini ya.

Itu aja, Pimpinan. *Enggak* usah ya, ya makasih, Pimpinan. Itu aja Bu Dirjen, Pak Dirjen, nanti komunikasi terus dengan Ka.Balainya juga Pak Salahuddin kalau *enggak* salah di sana juga bagus Pak Iwan, semoga SK-nya cepetan ditunggu, Makasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Ada yang menarik satu tadi, Pak, rumah menteri kurang lebih 14 miliar, terus dipertanyakan Anggota DPR tinggal di mana? Tentu akan dibangun juga rumah masing-masing 20 miliar barangkali.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B KADY, MS):

Ada, ada rumah susun, Ketua.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pimpinan, gedung dan rumahnya sudah semuanya, kita gedung apa, apa gitu, kan *enggak* tahu makanya minta tanya.

KETUA RAPAT:

Iya, iya, iya.

Terima kasih, Bu Novita.

Pak Ilham Pangestu.

F-P. GOLKAR (ILHAM PANGESTU):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bu Diana dan Pak Iwan beserta kawan-kawan yang hadir pada rapat pada hari ini.

Tadi saya menyoroti tentang pembangunan PON Sumatera-Aceh, Bu. Saya berharap PON Sumatera-Aceh ini terkhususnya di Aceh ini setelah tinggalnya PON itu banyak meninggalkan bekas yang bermanfaat untuk Aceh, Bu. Salah satunya di daerah Aceh Tengah yang ada dua Cabor yang akan dipertandingkan, triathlon dan pacuan kuda, tetapi permasalahan di Aceh Tengah yang kita lihat ini masalah membutuhkan peningkatan pelayanan dasar air bersih yang pada saat ini di Lelebo bisa menghasilkan 8 liter per detik dan akan kita meningkatkan menjadi 40 liter per detik dari Sungai Pesangan. Ini saya berharap kepada Bu Diana dan Pak Ka.Balai, Pak Deni untuk bisa meninjau, jadi sehingga ketika PON ini dipertandingkan dan meninggalkan Aceh maka manfaatnya itu sangat besar yang ditinggalkan dengan *event-event* besar seperti ini. Ini mohon ditinjau, dilihat ke lokasi bagaimana perlunya air bersih di daerah Aceh Tengah ini.

Dan untuk Pak Iwan, tadi teman-teman bilang pada tahun 2024 sangat membutuhkan perumahan BPS, tapi kita melihat anggarannya ini sangat kecil Ketua, ini para Anggota dan para Pimpinan untuk bisa memperjuangkan bagaimana Dirjen Perumahan ini meningkatkan anggarannya. Kalau kita lihat dari rumah swadaya hari ini yang dianggarkan cuman 1 triliun, padahal waktu 2023 cuma 3,26 triliun ini. Ini bagaimana pentingnya di Aceh juga kita ketika reses melihat banyak sekali rumah-rumah ibu-ibu tua yang ketika bocor, kita sedang tidur mereka sibuk menutupi seng-seng yang masih bocor. Ini kebutuhan-kebutuhan ini kita pada tahun akhir-akhir ini di 2024 bagaimana kita menganggarkan anggaran kita untuk daerah-daerah kita dengan hati sehingga ketika nanti 2025 atau periode selanjutnya ketika kita tidak ada di sini, kita bisa meninggalkan bagaimana rumah-rumah anak yatim itu yang tentunya bisa kita perbaiki. Ini mohon kepada Pimpinan untuk bisa meningkatkan anggaran kepada kawan-kawan yang ada di Banggar, meningkatkan anggaran perumahan untuk bisa kita perjuangkan pada tahun-tahun berikutnya.

Mungkin ini saja, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Ada Pak Syarif di sini ini? sudah dengar tadi itu? karena pernyataan Ilham tadi mewakili kita semua Anggota Komisi V.

Ya, berikutnya Pak Sudjadi, senior kita. Silakan Pak Sujadi, yang terakhir dia minta, dia selalu minta terakhir.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya hanya usul 3, terutama tentang pembangunan SPAM, Bu Dirjen. Ibu mempunyai 3 program pembangunan SPAM baru, perluasan SPAM sama Pamsimas. Sebentar lagi pemilu mereka-mereka yang ada di sini pengen terpilih kembali kalau suara di desanya baik. Mohon sebagian anggaran ini digeser ke Pamsimas, Bu, supaya beliau-beliau itu merata dapat jatah Pamsimas di desanya karena kita-kita jadi kalau *ndak* dapat suara dari desa *ndak* mungkin, bupati *nggak* mungkin, gubernur *nggak* mungkin. Silakan kalau teman-teman ada yang bantah, jadi kita berdayakan desa supaya Pamsimas jumlahnya ditambahi silakan.

Yang kedua, KOTAKU, Bu, masukkan padat karya, Bu, di sini tidak masuk, teman-teman mungkin pada lupa, ada yang *mempeng* tapi *ndak* ada yang menanyakan.

Yang terakhir pada rumah swadaya, mohon walaupun itu siapa dari partai apapun masuk di Dapil saya harus sesuai dengan peraturan, satu dicek dulu lapangannya dengan tim dengan desa, baru diusulkan jangan sampai tipu-tipu, *apus-apan*, pinjam bank, rumahnya sudah rusak, rumahnya di-*bubrah* dulu karena ini, tolong Dapil kami itu bebas Pungli, bebas polusi, Pak, terima kasih, bebas korupsi.

KETUA RAPAT:

Terima kasih senior, Pak Sujadi.

Terakhir rupanya adik saya, Atari silakan.

F-PAN (ATHARI GHAUTHI ARDI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi V, Bu Dirjen.

INTERUPSI F-P. NASDEM (SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):

Ketua, interupsi, *kok* cuma satu yang dipanggil adek.

KETUA RAPAT:

Bapaknya itu saya punya teman sahabat, sahabat luar biasa.

F-PAN (ATHARI GHAUTHI ARDI):

Iya, kalau di sini panggilnya Pimpinan, kalau di luar panggilan Om Ridwan, saya, karena udah kenal lama dulu, sudah kenal dari dulu dengan Pak Ridwan, iya, karena Bapak, ponakan, saya ponakannya Pak Ridwan.

Bu Dirjen, Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya dan juga seluruh Kepala Balai ya, khususnya Kepala Balai saya,

Bu Dirjen, Pak Dirjen, saya cuma ada beberapa poin aja. Di sini yang pertama saya mau apresiasi buat Cipta Karya dan juga Perumahan melalui Ka.Balai saya, Pak Kusworo dan juga Pak Zubaidi, itu setiap ada aspirasi ataupun ada bencana dan segala macamnya mereka sangat tanggap dan itu komunikasinya baik, tapi di sini ada satu permasalahan itu soal sanitasi ya, di kabupaten eh di Kota Solok kalau *enggak* salah itu. Kemarin ada permasalahan terkendala dari apa ya kepala, lurahnya atau dari pokoknya dari pemerintah daerahnya, ada *problem* sampai akhirnya saya harus bersurat kepada PUPR supaya itu dipindah karena memang tidak ada tanggapan yang baik dari pemerintah kotanya. *Nah*, ini saya mohon suratnya sudah masuk dari

tanggal 9 Mei, 9 Mei tetapi sampai hari ini saya, apakah sudah dipindah atau belum itu saya *enggak* tahu. Bu Dirjen, saya minta untuk dicek ya soal program Sanimas di Kota Solok itu ada dua, di satu kecamatan itu beda kelurahan tapi kelurahan yang baru saya minta itu di Tanah Garam dan juga di Tanjung Paku.

Nah, ini saya mohon *update* dari ininya, Karena gini susahnya, Bu, ya, kadang programnya masyarakatnya yang minta tiba-tiba karena harus berbelit-belit melalui banyak saringan, akhirnya *enggak* lolos sampai ke bawah. *Nah*, ini jadi kekhawatiran juga, tapi ya namanya aturan kita tidak boleh menyalahi ya, itu sudah diatur semua, makanya saya minta karena ada kejadian luar biasa ini, saya mohon yang Kota Solok ini, saya minta *update*-nya, apakah sudah dipindah apa belum? karena masyarakatnya nanya ke saya. Ibu, kami jadi *enggak* dapat gitu, saya belum bisa kasih jawaban karena memang belum jelas gimana kendalanya, tapi pada intinya seluruh program-program yang lain untuk di Sumatera Barat itu saya sering turun bersama dengan Pak Ka.Balainya juga saya sering tanyakan sering *update alhamdulillah* programnya lancar semua dan saya harap untuk tahun 2023 ini akan ada beberapa tahapan. Semoga tahapannya bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan untuk 2024 sama dengan teman-teman yang lain untuk beberapa program, kami harapkan anggarannya bisa ditambah terutama untuk perumahan, karena masalah perumahan ini, Pak, ini *human rights* ya, ini paling, paling ini hak kita yang paling mendasar dan kebetulan untuk perumahan masyarakat kami di sini masih sangat *memprihatinkan*.

Itu aja mungkin, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Pimpinan, dikit lagi, tadi kelewatan. Sedikit aja.

KETUA RAPAT:

Kalau istimewa boleh, istimewa boleh, boleh.

F-P. GERINDRA (Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Jadi tadi sempat ketinggalan. Saya ingin menyampaikan, saya secara pribadi ini kepingin tahu program-program yang ada di Dapil saya, Bu, Banyumas-Cilacap, Ibu dan Bapak Dirjen.

Kemudian program yang ada di sana mungkin saya belum tahu, mohon diinformasikan kepada saya atau kepada tim, kemudian kalau ada yang turun bisa bersinergi, kita bisa melihat sama-sama, itu aja, semua program yang ada di Dapil.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Novita.

Jadi dari Anggota yang terhormat sudah selesai semua, dari Anggota cukup ya? cukup, Pak Aras, tidak ya? cukup ya? ya, sekarang di meja Pimpinan.

Kami persilakan Pak Robert, silakan Pak.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, terima kasih.

**Pimpinan, Anggota yang saya hormati,
Pak Dirjen, Bu Dirjen dan seluruh jajaran,
Kepala Balai seluruh Indonesia yang hadir,**

Pertama-tama, saya ke Ibu Dirjen Cipta Karya, ya. Saya kira apa yang disampaikan Bu Novi tadi itu betul, bahwa setiap program yang ada di daerah kami tolong kami dikoordinasikan, Bu Dirjen, kenapa Bu Dirjen, saya tadi sempat menanyakan ke TA saya, staf saya karena teman-teman sampaikan banyak hal terhadap renovasi fasilitas pendidikan, tapi saya sampai saat ini saya belum dapat info fasilitas-fasilitas pendidikan di daerah kami, dan saya udah cek kemarin 2023 ada bantuan fasilitas pendidikan di Universitas Okmin ya, di Perumahan Bintang, itu senilai 15 miliar kalau *enggak* salah Bu Dirjen, itupun baru saya ngecek infonya dan ada beberapa bantuan untuk SD dan sekolah ya SMP, SMA itu sekitar 15-an ya, karena Papua dibagi dua wilayah ya Bu ya, Papua 1 dan Papua 2 yaitu daerah pegunungan dan pesisir ya, Papua 1, oh gitu, oke, oh ya, perumahan ya. Artinya memang harusnya dibagi wilayah seperti itu, kenapa? menyangkut anggaran, Bu, ya kan karena pegunungan itu anggarannya beda ya, itu tadi saya sampaikan karena ada beberapa program yang kami tidak bisa dapatkan seperti TPS3R itu untuk masuk di daerah pegunungan, *nah*, ini kepala balainya ada, *nah* itu susah karena anggarannya sangat terbatas, di sana tidak mungkin dengan 500 juta itu, itu kami bisa mendapatkan itu di sana, maka ini menjadi catatan penting, Bu, untuk anggaran kalau memang itu diberikan ya tolong di *space* bahwa kalau Papua pegunungan itu anggarannya sesuai, bisa nanti Kepala Balai tahu

persis tingkat kemahalan di sana, saya kira itu sudah ada dapat menghitung berapa besar yang bisa dipakai.

Jadi kalau tidak, Bu, mungkin juga menurut saya ya program-program yang kami tidak bisa menyerap seperti itu, ada beberapa program yang membutuhkan apa, penyerahan lahan karena di sana sangat susah ya, itu mungkin bisa dirubah ya kan. Kalau ini kami tidak bisa terserap maka mungkin seperti tadi saya sampaikan ya kan, mungkin bisa dipindah ke PISEW, PISEW pasti kami bisa terserap, ya kan. Jadi mungkin hal-hal ini perlu mungkin komunikasi kita, Bu, komunikasi supaya mana yang kita tidak bisa terserap bisa dirubah supaya bisa terserap, sayang anggaran itu nanti tidak terpakai maka manfaatnya harus bisa maka kemarin kami dari atas, kami koordinasi, kami turunkan ke bawah itu satu sudah sarmi dan satu temapi, itu karena supaya anggaran itu tidak terbuang percuma. Jadi saya kira ini perlu, Bu, untuk kita komunikasi hal-hal ini supaya program-program yang di tempat lain bisa, tapi di tempat kita tidak mungkin bisa, kalau bisa tapi anggaran akan melipat. *Nah*, itu konsekuensinya dari, dan ini perlu komunikasi dengan Ibu agar bisa jalan. Saya kira teman-teman di Cipta Karya, teman-teman Ibu Kepala Balai ada sekarang ini ya, untuk semua tahu bahwa, satu bahwa kita ini harus bersama-sama. Bahwa ada program padat karya, ada program yang memang itu adalah program yang diberikan kepada Anggota, menentukan lokasi dan sebagainya agar itu tidak dipindah-pindahkan. Saya minta kepada semua Kepala Balai yang ada di sini untuk taat sama-sama ya karena hari ini saya berterima kasih semua hadir di sini untuk itu.

Yang berikut, saya kira pada Dirjen, Pak Iwan dan seluruh jajaran. Saya terima kasih program BSPS sudah berjalan, tapi kemarin saya sampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Kepala Balai hadir di sini, Ka. Balai sudah berkomunikasi baik ya, cuman di bawah ini masih ada kendala. Harapan saya supaya Satkernya ini bisa lebih berjalan baik lagi karena yang lalu itu kami bisa berjalan bersama-sama ya, PPK-nya, Satker itu berjalan bersama, tapi yang sekarang ini kemarin ada kendala. Jadi mohon jadi perhatian dan Kepala Balainya hadir supaya secepatnya program ini bisa berjalan karena kami sangat terlambat dibandingkan dengan yang tahun lalu, Pak. Jadi tahun lalu, dua tahun yang lalu itu jalannya sangat lancar, sekarang ini kami terlambat sekali. Harapan saya dengan pertemuan hari ini kita bisa berjalan dan lebih khusus lagi ini untuk kita semua, Kepala Balai semua seluruh Indonesia yang hadir di sini bahwa ada program yang diberikan Anggota kepada fraksi itu sudah *clear* di antara Anggota. Jadi tidak ada lagi Kepala Balai yang bilang ini harus minta izin kepada yang punya Dapil, tidak, karena lintas fraksi itu sudah kita, para Anggota di sini sudah *clear* ya, jadi tidak lagi harus seizin yang punya Dapil. Kami sudah *clear*-kan secara komisi di sini. Dan harapan saya sebagai Pimpinan di sini, ini tidak lagi menjadi masalah ya, Kepala-Kepala Balai tidak lagi menjadi masalah, kami sudah *clear*-kan semua dan kemarin bersama Pak Menteri juga sudah *clear*, Pak Dirjen sudah *clear*, Kepala Balai semua tidak ada lagi halangan untuk program-program yang diberikan Anggota kepada fraksi ya, itu sudah *clear* semuanya. Jadi harapan saya ini tidak lagi ada halangan.

Yang berikut Pak Dirjen, kami memang punya usulan yang kemarin, rumah susun di Yahukimo, saya kira sudah berjalan dan di Jayawijaya. Harapan tadi saya sudah cek kembali, sertifikat sekarang lagi dicetak, Jayapura mudah-mudahan tidak sampai akhir bulan ini sudah selesai. Jadi ini saya mohon supaya ini segera berjalan sesuai progres dan saya kawal terus sertifikatnya paling lambat saya kira 10 hari ke depan sudah terbit ya, karena itu sudah dicetak, tinggal dicetak. Jadi ini yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan untuk kesempatan yang diberikan, sekali lagi pada Bu Dirjen, Pak Dirjen, saya kira apa yang kami sudah sampaikan dan kami *komit* bersama untuk bisa berjalan bersama nanti program-program di 2023 ini bisa berjalan dan program untuk 2024, saya kira bisa kita percepat nanti untuk. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Roberth. Pak Roberth ini juga Ketua Fraksi, Pak, dari Nasdem, untuk Bapak ketahui supaya para Kepala Balai, Kepala Balai sudah tahu semuanya.

Saya juga sedikit, Pak. Mungkin saya bertanya dulu kepada Pak Dirjen Perumahan, tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa di IKN itu juga Kementerian PUPR membangun perumahan untuk 20.000 karyawan kalau saya tidak salah, maaf Pak 20.000 ini untuk para pekerja ya?

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Hunian pekerja konstruksi, Pak.

KETUA RAPAT:

Hunian?

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Sudah terbangun, Pak.

KETUA RAPAT:

Hunian para pekerja konstruksi.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Tentu ini-kan sangat banyak ini sangat besar ini dari 20.000 ini. Pertanyaannya adalah kita kan tahu bahwa setelah selesai konstruksi secara menyeluruh, itu pasti mereka tinggalkan tempat. Pertanyaannya adalah bangunan ini dipakai untuk apa lagi, direncanakan untuk apa ini. Itu yang saya ingin bertanya yang pertama.

Yang kedua tentang BSPS. BSPS ini sangat dibutuhkan betul masyarakat, Pak, saya kira teman-teman tadi sudah menyampaikan itu, barangkali menjadi perjuangan kita secara bersama-sama, baik dari Dirjen Perumahan maupun kami dari Komisi V yang duduk khususnya di Banggar secara kebetulan di sini ada juga Wakil Ketua Banggar, yang ada di sini, Pak Syarif, untuk diperjuangkan secara bersama-sama sehingga kita bisa dapatkan apa namanya, bantuan padat karya dalam bentuk BPS itu adalah yang mana buat masyarakat kita di Indonesia.

Yang berikutnya kepada Ibu Dirjen. Ibu Dirjen, saya pertama saya ingin bicara dulu persoalan pendidikan. Di Indonesia ini pendidikan sangat, sangat prihatin kita kalau kita jalan ke daerah-daerah tentang persoalan sekolah-sekolah kita, baik Tsanawiyah misalnya, Madrasah, SMP, SD, SMA dan seterusnya. Di Sulawesi Tenggara saja misalnya itu begitu banyak daerah yang sangat membutuhkan itu. Salah satu contoh saya misalnya contohkan di Kabupaten Muna, namanya SMP Negeri 4 di Kota Raha Kabupaten Muna, itu muridnya saya hafal betul jumlahnya, 1.024 orang, murid sekolahnya. Ruang kelasnya itu adalah 20, 20 ruang kelas, tapi dari 20 ruang kelas ini adalah sudah kumuh semua, bahkan tidak memenuhi syarat lagi ketentuan baku tentang luas ruangan sebagai SMP misalnya sehingga daya tampung apa namanya ruangan itu harusnya cuma 30 dia menjadi daya tampung 50. Keluaran per tahun itu 300 orang, keluaran per tahun, ya itu artinya yang tamat, yang tamat sekolah itu ada 300 orang, yang masuk kurang lebih 500 orang tetapi akhirnya ditolak 200 orang-nya karena tidak cukup ruangan.

Saya pernah turun ke sana bersama Ka.Balai Ibu Dirjen, Pak Wayan ada di sini, Pak Wayan itu kita turun ke sana langsung dan kami tahun 2023 sudah mengusulkan itu kepada Bu Dirjen, tapi mungkin barangkali keuangan kita masih terbatas. Saya mohon antar, agar tahun 2024 ini bisa menjadi prioritas. Kenapa saya minta diprioritaskan? karena pertama arus murid tadi itu sendiri. Yang kedua sudah pada lapuk ruangnya itu, dari 20 ruangan itu, ada 18 ruangan sudah pada lapuk semua. Takutnya saya jangan sampai jadi korban dan menjadi berita dunia, anak sekolah kita, murid kita tertimpa reruntuhan bangunan akibat kurangnya perhatian pemerintah. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya minta kepada Bu Dirjen untuk menjadi perhatian.

Yang berikutnya, salah satu pasar, pasar itu kebakaran, *waduh*, sudah di bawah tahun 2000, di bawah tahun 2000, sampai sekarang itu belum dibangun-bangun sama sekali. Jadi masyarakat itu masih tinggal di pasar yang tradisional, tinggal di barak-barak, tenda-tenda dan seterusnya ini. Dan kalau boleh juga ini adalah menjadi perhatian karena dari Kementerian Perdagangan

juga sudah bersurat ke Menteri PUPR, hasil kunjungan mereka dengan melibatkan juga Cipta Karya yaitu Balai Cipta Karya di Kendari, anak buah Bu Dirjen dan sudah bersurat juga kepada Bu Dirjen melalui menterinya, kalau saya tidak salah Menteri Perdagangan sudah menyampaikan itu. *Nah*, saya juga minta tolong 2024 ini untuk menjadi perhatian Bu Dirjen.

Saya kira hanya itu yang saya ingin sampaikan dan saya mohon menjadi perhatian utama dari Bu Dirjen dan Pak Dirjen.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B KADY, MS):

Izin, Pimpinan, sedikit.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B KADY, MS):

Pak Dirjen, saya ingin jawabannya sebentar, Pak, *enggak* usah tertulis, mengenai dana yang bersumber dari BUN, apa tidak termasuk dalam pagu anggaran sebelumnya. Itu yang saya mohon diberi penjelasan kepada saya, karena ada dana BUN tadi masuk, Pak, ya untuk kegiatan-kegiatan. Apakah masuk dalam pagu anggaran yang telah ditetapkan di Komisi V atau tidak?

Terima kasih.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Tidak, Pak.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti, dijawab sebentar sekaligus.

INTERUPSI F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua, interupsi sedikit dari saya.

KETUA RAPAT:

Ya, pendek-pendek saja, silakan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK):

Pak Ketua, ada satu badan yang dibentuk oleh pemerintah terkait penanganan IKN. apakah perlu badan ini di apa, bisa dijadikan mitra Komisi V? karena tidak ada komisi lain selain Komisi V yang berwenang membahas tentang penyelenggaraan infrastruktur penyelenggaraan IKN.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, itu kan Badan Otorita IKN, kalau saya tidak salah informasinya itu lagi diproses di meja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi namun demikian barangkali kita nanti bisa dengarkan dari Pak Dirjen dan Bu Dirjen.

Baik.

Demikianlah penyampaian dari Anggota yang terhormat.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Masih ada?

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Saya kira tadi teman-teman sampaikan soal pasar. saya ingat bahwa saya kemarin saya memimpin kunjungan spesifik kami ke Blitar, ada pasar yang terbakar di sana. Mohon, Bu, mungkin bisa jadi catatan, karena setiap hasil kunjungan itu wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti. Jadi mohon juga untuk menjadi catatan Ibu untuk 2024 untuk pasar yang terbakar, hasil kunjungan spesifik kami di Blitar ya, mohon jadi catatan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Roberth.

Demikianlah penyampaian dari pendalaman dari Anggota Komisi V dan Pimpinan Komisi V.

Selanjutnya kami minta tanggapan langsung dari Dirjen Perumahan dulu ya, jadi tadi, ya, jadi kita minta jawab yang penting-penting saja, nanti yang lainnya adalah secara tertulis.

Ya, saya persilakan Pak Dirjen Perumahan.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota.

Mungkin saya juga singkat saja, hanya dua poin saja yang ingin saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan program 2023. Jadi kami seluruh jajaran, jadi yang perlu kami sampaikan, Kepala Balai ini sudah hadir kemarin dan kami sudah konsolidasi internal, jadi kesepakatan, arahan sudah kami sampaikan langsung kepada mereka dan kami mohon pertama kaitan dengan komunikasi di lapangan kiranya bisa lebih cair dan lebih efektif kemudian koordinasi juga demikian dan kemudian percepatan terhadap proses. Jadi semua arahan tadi ini termasuk dengan para direktur. Jadi kemarin kami konsolidasi seluruh Eselon II dan para Kepala Balai untuk bisa menjalankan karena kita akan memasuki semester kedua, jadi ini etape terakhir kita harus segera tuntaskan.

Jadi, kami ini dengan seluruh jajaran ya, hadir di sini berkomitmen, Pak, ya untuk mengawal ini dan kami juga mohon dukungan Bapak-Ibu sekalian untuk kiranya di lapangan ikut mengawal serta memastikan Bapak-Ibu sekalian kaitan dengan pemenuhan *readiness criteria* dan eligibilitas terkait dengan hal-hal yang diusulkan, termasuk mungkin yang seperti Pak Menteri sampaikan kalau ada pernak-pernik yang terjadi di lapangan itu, Pak. Jadi mohon kiranya kami ikut dibantu.

Kemudian terkait dengan lanjutan tadi mungkin Pak Irmawan menyampaikan yang mangkrak, bukan mangkrak ya. Jadi artinya ya memang karena situasinya memang harus putus kontrak, Pak, gitu ya, karena wanprestasi tapi langsung kami mintakan audit dari BPKP, Pak. Jadi supaya tidak timbul masalah hukum, ini kita lakukan audit pisah batas untuk menentukan apa yang sudah dilakukan yang lalu dan apa yang sisa pekerjaan untuk kemudian dialokasikan kembali anggaran untuk dilanjutkan. *Nah*, jadi dan kami sudah minta Pak Direktur terutama yang di Aceh ini agak agak terlalu lama menurut saya proses di BPKP-nya. Jadi nanti kami akan bicara khusus, kami agendakan bertemu dengan Pimpinan BPKP di pusat untuk *menyegerakan* agar selanjutnya akan kami proses untuk dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun ini.

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P):

Kalau bisa skemanya, Pak Dirjen skema apa namanya, swakelola untuk ke depan.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Nah, ini kan (*suara kurang jelas*)

F-PKB (H. RUSLAN M. DAUD, S.E., M.A.P):

Kelanjutannya.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Ya, ya ini kaitan dengan apa namanya kan juga ada ketentuan yang berlaku, Pak, jadi kami juga mintakan fatwa dari LKPP skenario yang tepat itu ya, apakah swakelola diizinkan itu. *Nah*, kalau swakelola kenapa dari awal tidak swakelola gitu? nanti akan menjadi pertanyaan, karena itu nanti dari BPKP *clearance*-nya akan terbit dari sana.

Kemudian terkait dengan yang BSPS di tahun 2023 kami menyadari beberapa di daerah dan sebagainya ada keterbatasan dari keswadayaan karena itu kami juga mendorong adanya kolaborasi, Pak. Jadi artinya kami membantu apa, mendorong sumber-sumber pendanaan lain di daerah. Kami minta para Kepala Balai untuk bisa menjalin kerja sama seperti yang sudah kami bangun di pusat misalnya dengan Baznas, kemudian dengan CSR beberapa lembaga agar ini sama-sama bisa menangani tadi, ini masalah-masalah perumahan yang tidak layak huni ini. Jadi misalnya di Jawa Barat sudah berlangsung, kemudian di Jawa Tengah dan beberapa daerah yang lain kolaborasi ini bisa berlangsung sehingga tadi kekurangan biaya dan ketuntasan bisa kita selesaikan. Itu yang pertama.

Dan yang kedua terkait untuk 2024. Jadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kekurangan anggaran, terima kasih dukungan Bapak-Ibu sekalian. Dan kami pada kesempatan ini sekali lagi juga mohon kiranya kaitan dengan pemenuhan tersebut, kiranya usulan-usulan dapat disampaikan ke kami sebelum bulan September begitu sehingga ini kami akan proses dan bisa dimasukkan ke dalam DIPA agar cepat dilaksanakan dan tidak membutuhkan revisi. Jadi kalau terpaksa mohon maaf kalau keluar Dapil ini membutuhkan revisi anggaran, Pak, justifikasi dan sebagainya ini kadang-kadang agak repot juga gitu, alasan dan sebagainya harus kami yakinkan.

Pertanyaan tambahan ada dua tadi, kaitan dengan hunian pekerja konstruksi pasca. Jadi begini, Pak, IKN ini kalau dari *timeline* nya ini dilaksanakan atas dasar Perpres 63 ya, baik jumlah dan kebutuhannya. Lalu kalau di dalam Perpres dan undang-undang, tahapan pembangunan IKN ini sampai 2045, Pak. Jadi bangunan ini memang memiliki masalah yang kita perkirakan sampai dengan 2045 dan kemudian pilihannya karena teknologinya juga pracetak modular yang bisa *knockdown*, itu bisa dibongkar dan bisa dimanfaatkan untuk yang lain atau bangunan itu di lokasi itu dapat dimanfaatkan misalnya ke depan untuk rusun pekerja atau rusun untuk

mungkin tenaga-tenaga industri misalnya yang ada tinggal di sana, dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebijakan pada saat itu, agar bisa memberikan manfaat.

Terus yang di BA-BUN, Pak, jadi tadi seperti yang saya sampaikan dari awal memang tidak teralokasi dalam anggaran. Jadi karena ada penugasan kemudian dimintakan tambahan anggaran dan Kementerian Keuangan mengalokasikan dari anggaran BA-BUN.

Mungkin demikian, Pak, dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Dirjen.

Bu Dirjen, silakan Bu Dirjen.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sebelum ke Ibu Dirjen, saya minta ke penegasan melalui Pimpinan ya, penegasan apa, Bu Dirjen Perumahan untuk yang masalah yang tadi saya sampaikan, biar ini, karena itu menjadi masalah untuk kita semua. Jadi supaya teman-teman Kepala Balai hadir di sini penegasan bahwa itu *clear* ya, Pak, yang lintas BSPS ya.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Oh sudah, itu *clear* Pak, sudah sudah kami sampaikan...

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sudah ya.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Dan malah sudah ada perintah, Pak. Jadi kalau untuk verifikasi sudah keluar dari direktur dan beberapa yang sudah lolos verifikasi bahkan terakhir tadi pagi sudah saya tanda tangani SK-nya.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Baik, itu sudah dipercepat, Pak, ya.

Terima kasih, Pak.

DIRJEN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR RI (IWAN SUPRIJANTO, S.T., M.T.):

Itu *clear*, jadi teman-teman juga yang dari Perumahan *clear* kan sama dengan yang kami sampaikan kemarin.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Dirjen, silakan juga yang penting-penting saja, Bu Dirjen.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Baik.

Terima kasih, Bapak, atas kesempatan yang diberikan untuk merespon arahan, masukan dan juga (*suara kurang jelas*) pada kami untuk kegiatan 2023 dan 2024 Cipta Karya.

Yang pertama, tentunya kami nanti dari usulan-usulan yang kami terima hari ini atau pun juga yang kemarin kami akan terima tahun 2023. Kami nanti akan melakukan identifikasi, Bapak, melakukan identifikasi, kami juga semuanya juga sudah ada dan mana yang sudah teralokasi, mana yang belum, akan kami laporkan ya, akan kami laporkan ke seluruh Anggota Komisi V sehingga hal ini tentunya akan terbaca di dalam *database* kita. Hal ini juga sebenarnya dimintakan juga oleh BPK, Bapak, untuk data-data yang dari aspirasi apa, kemudian yang masuk apa, yang keluar apa, sehingga itu nanti akan kami sampaikan ke seluruh Anggota Komisi V sehingga nanti kita bisa mengetahui mana yang bisa dialokasikan, mana yang tidak kepada seluruh Anggota.

Kemudian yang kedua, teman-teman balai yang hadir di sini, mungkin tadi juga sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi V maupun Anggota Komisi V, saya mohon untuk selalu tetap komunikatif ya dan responsif untuk segala sesuatunya yang terjadi misalnya permasalahan-permasalahan tidak boleh ataupun diganti usulannya ataupun nanti digeser harus selalu dilaporkan kepada teman-teman, mohon izin Anggota Komisi V dan juga Pimpinan Komisi V, sesuai dengan Dapil-Dapilnya ya.

Kemudian agar teman-teman balai yang komunikasinya kurang bagus mohon untuk diaktifkan komunikasinya.

Yang kedua, *eh* yang ketiga Bapak, terkait dengan PON Aceh dan Sumut, sebenarnya kami sudah melakukan identifikasi dan kami akan melakukan pelelangan, Bapak. Kami belum bisa melakukan ini tapi baru akan melakukan pelelangan di bulan Juni, Juli ini, untuk Aceh bulan Juli, Pak, mudah-mudahan karena ini renovasi-renovasi mudah-mudahan bisa selesai.

Mohon izin, Pak, jadi untuk KOTAKU, NSUP sebenarnya kita sudah *loan closing date* di 30 Juni 2023, sehingga kemarin sebenarnya kita sudah gantikan dengan KOTAKU dengan APBN tapi sepertinya keputusan dari Bapak Menteri memang untuk KOTAKU sementara di-*close*.

Kemudian selanjutnya KOTAKU, KOTAKU selanjutnya mungkin nanti kami dengan Bank Dunia tadi pagi kami dengan Bank Dunia akan mencoba memformulasikan kembali untuk KOTAKU, tidak hanya kepada pembangunan infrastrukturnya saja tapi justru bagaimana masyarakatnya, *behaviour*-nya ketika pasca menerima bangunan ini juga mereka juga akan meningkat juga ininya, ya mudah-mudahan *gitu*.

Kemudian untuk sekolah madrasah yang intinya kalau itu negeri, rusak berat, kami akan tindaklanjuti, Bapak, ya akan tindak lanjuti dan secara detail mungkin tadi banyak sekali ya untuk misalnya dari Bapak Robert Rouw, untuk Papua ini juga ada dari Okmin kemudian MAPPI itu ada 3 dan Merauke ada 5, namun demikian nanti saya mohon Direktur pelaksanaan strategis yang menangani ini untuk lebih responsif lagi dan memberikan masukan-masukan, Bu Esih, ini ada Bu Esih di sini, Bapak, nanti akan memberikan catatan-catatan mana yang masuk dan mana yang tidak ya.

Kemudian Bu Novita yang, oh, sebelum Bu Novita, untuk SPAM Balikpapan ya, siap. Untuk SPAM ya, SPAM ini khususnya untuk Balikpapan, Balikpapan ini juga nanti akan ada 500 liter per detik, Bapak, itu juga sumber air bakunya kita ambil dari Sepaku Semoi di IKN, ya di Sepaku Semoi IKN, tapi karena Balikpapan ini juga bagus nanti mungkin tidak dengan APBN langsung tapi dengan menggunakan DED, apa, KPBU atau *B to B* dan ini kemarin kami sudah bicarakan. Untuk Gayo Lues Tenggara dan juga Singkil ini sedang kita susun DED-nya, mudah-mudahan ini bisa kita masukkan di tahun 2024, Bapak.

Kemudian untuk yang Sambas, ini sebenarnya juga sudah masuk di dalam MYC, oh udah nggak ada, MYC 2023-2024. SPAM Singkil juga tahun 2015 kemarin sudah dibangun tapi nanti kami akan cek lagi apakah masih ada kekurangan atau tidak.

IKN untuk DPR/MPR seperti kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, gedungnya nanti akan kita bangun setelah tahun 2024 karena memang pembangunan tadi Pak Iwan menyampaikan memang sampai dengan 2045, dan nanti untuk rumah dan sebagainya nanti mesti harus kita inikan kembali. Kalau desainnya DPR/MPR itu seperti apa kita sudah sayembarakan Pak dan sudah ada pemenangnya dan saat ini kita sedang melakukan untuk perencanaannya secara keseluruhan DPR/MPR tersebut ya.

Kemudian terakhir, terkait dengan masalah untuk kegiatan-kegiatan yang di Dapil di luar dari yang usulan nanti juga akan kami sampaikan, Pak, tidak hanya yang ini, seperti tadi Bu Novita di Banyumas memang tidak hanya IBM dan juga yang disampaikan ada kota lama Banyumas juga, *nah* ini juga harus kami laporkan juga.

Mungkin demikian, Bapak, yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya tetap untuk bersama-sama dengan teman-teman Ka.Balai untuk bersatulah, Pak, sama seperti pusat dan daerah tentunya arahnya sama dan kami sudah sampaikan juga kepada seluruh Ka.Balai untuk selalu berkomunikasi dengan baik.

Terima kasih, dan

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumussalam.

Terima kasih, penjelasan Bu Dirjen, maupun Pak Dirjen dalam hal ini Bu Diana sama Pak Iwan.

Sekarang coba masuk ke kesimpulan, kesimpulan,

**DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN CIPTA KARYA DAN DIRJEN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PUPR
SELASA, 13 JUNI 2023**

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 di mana capaian per 12 Juni 2023 sebagai berikut:
 - (1) Ditjen Cipta Karya adalah sebesar, realisasi keuangannya 24,60% sementara realisasi fisik ada 23,09%;
 - (2) Ditjen Perumahan, capaian atau realisasi keuangan 24,36%, sementara realisasi fisik adalah 27,33%,
2. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR mengenai rincian program dan alokasi pagu anggaran untuk Eselon I dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - (1) Ditjen Cipta Karya, pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 adalah Rp32.455.360.000.000,00, pagu indikatif sebesar 27.000.000.000.000, selisih *backlog* ini adalah 5.455.360.000.000.
 - (2) Ditjen Perumahan, pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2024 adalah Rp25.132.229.182.000,00, pagu indikatif tahun 2024 sebesar enam triliun seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta *backlog*-nya adalah Rp18.980.708.421.000,00

Wah, luar biasa juga nih, jauh sekali ya, dari 25 yang ada cuma 5, cuma 6, 6 triliun.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI sepakat dengan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran dalam membiayai program atau kegiatan padat karya antara lain bantuan stimulan perumahan swadaya sesuai mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 di DPR RI.

3. Komisi V DPR RI sepakat dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan rincian program dan menyempurnakan RKA atau K/L masing-masing Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran dan pendapat serta usulan Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam rangkaian proses Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Bagaimana Anggota yang terhormat, setuju?

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Begini, Ketua, bukan tidak setuju. Saya sungguh amat-amat prihatin dengan Dirjen Perumahan, selama hayat dikandung badan, selama hidup ini belum ada 25 triliun lalu turun menjadi 6 triliun, ini keprihatinan nasional.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mudah-mudahan prihatin itu bisa terjawab dengan usulan kita. Bagaimana Anggota Komisi V, setuju, Pak?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian pemerintah? Setuju? setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Ya, dengan demikian kita minta sambutan akhir dan kata penutup dari Bu Dirjen atau Pak Dirjen, silakan.

DIRJEN CIPTA KARYA KEMENTERIAN PUPR RI (Ir. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):

Katanya anggarannya yang lebih gede.

Baik, mohon izin.

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Komisi V DPR RI dan juga para Anggota Komisi V DPR RI,

Kami menyampaikan terima kasih atas arahan-arahan dan juga masukan-masukan dan juga mengingatkan kepada kami semuanya untuk beberapa hal yang kami belum tindak lanjuti dalam rangka untuk mengantisipasi aspirasi dari masyarakat. Untuk hal tersebut, hal ini akan menjadi hal yang kami pertimbangkan untuk alokasi 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa berkoordinasi untuk yang lebih baik lagi di tahun depan.

Demikian.

Terima kasih, dan

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Demikianlah acara rapat pada hari ini dan tentu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Dirjen dan Pak Dirjen dengan seluruh jajarannya. Sekaligus kami ingin menyampaikan doa kepada para Kepala Balai karena jauh-jauh datang dari daerah masing-masing, tentu kami dari Komisi V baik Anggota maupun Pimpinan mendoakan agar bisa cepat, bisa selamat dalam perjalanan berkumpul kembali kepada keluarga.

Terima kasih.

Kita tutup acara ini dengan ucapan *bismillahirrahmanirrahim*, acara kita tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.55 WIB)

JAKARTA, 13 Juni 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

